

The Globalism Institute

Globalism Institute adalah sebuah Pusat Penelitian di RMIT University, Melbourne, Australia yang melakukan riset di berbagai lokasi di seluruh dunia yang berhubungan dengan bidang-bidang riset tematik. Globalism Institute mulai bekerja di Timor-Leste tahun 2003, dengan fokus khusus pada tema-tema keamanan (security) dan keberlanjutan (sustainability). Tema-tema ini ditarik masuk ke Global Cities Insititute yang baru, yang diresmikan pada tahun 2006 untuk mengumpulkan periset-periset kunci di RMIT University untuk meneliti kerumitan seting-seting perkotaan yang sedang dalam proses menjadi global. Global Cities Institute memusatkan perhatian pada sejumlah kota-kota di wilayah Asia-Pasifik, termasuk Dili, dan proyek Community Security and Sustainability (Ketahanan dan Keberlangsungan Komunitas) yang sedang berlangsung saat ini adalah hasil langsung dari prakarsa baru tersebut. Untuk informasi lebih lanjut silakan lihat www.Timor-Leste.org

Oxfam Australia

Oxfam Australia sudah mendukung pekerjaan pembangunan jangka panjang di Timor-Leste sejak tahun 1975. Oxfam bekerja dalam kemitraan dengan dua puluh enam organisasi mitra lokal, Pemerintah, dan kelompok-kelompok masyarakat di tiga distrik untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan-layanan pokok; memastikan agar kelompok-kelompok yang terpinggirkan mendapatkan peluang untuk mengambil bagian dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka; dan mengatasi akar penyebab konflik demi membangun perdamaian yang kekal.



Kelompok nelayan, Maquelab, Januari 2007

www.timor-leste.org



ISBN 978-0-646-48687-1

Pembangunan Sosial dan Ekonomi di Oecusse, Timor-Leste



Laporan riset dibuat oleh Oxfam Australia dan Globalism Institute, RMIT University, Melbourne

Kym Holthouse dan Damian Grenfell



Pembangunan Sosial dan Ekonomi di Oecusse, Timor-Leste

Laporan riset dibuat oleh Oxfam Australia
dan Globalism Institute, RMIT University, Melbourne



Kym Holthouse dan Damian Grenfell



Informasi yang ada dalam laporan ini tersedia secara bebas untuk dipakai oleh organisasi-organisasi yang ikut serta dan pihak-pihak lainnya yang berminat. Di mana informasi dikutip atau digunakan, para pengarang memohon agar laporan ini disebut. Untuk kepentingan komersil, dokumen ini adalah hak cipta © 2008 Globalism Institute.

Social and Economic Development in Oecusse, Timor-Leste

1. Holthouse, Kym 2. Grenfell, Damian

ISBN 978 0 646 48687 1

Gambar sampul: Pegunungan spektakuler yang membentuk latar belakang Pante Makasar, dilihat dari dek belakang feri baru Oecusse, Nakroma, yang disediakan dengan bantuan dari pemerintah Jerman pada tahun 2007, Mei 2007

Daftar Isi

Akronim dan Glosarium	5
Pengantar	7
Lingkungan Riset	8
Sumber-sumber Informasi	9
Pengantar Sosial Budaya tentang Oecusse	11
Pembangunan Ekonomi dan Keamanan di Oecusse	18
Ketataperintahan dan Otonomi	18
Perubahan pada Struktur Ketataperintahan Daerah	20
Penanaman Modal Asing dan Zona Ekonomi Khusus	22
Sebuah ZEK di Oecusse	25
Pertanian dan Wanatani	26
Peternakan	28
Wanatani	28
Perbatasan Oecusse	29
Isu-isu Keamanan Paska Kemerdekaan	30
Layanan-layanan Infrastruktur dan Konsuler	33
Dampak Ekonomi dari Kebijakan-kebijakan Perbatasan	33
Kesimpulan	34
Bibliografi	36

The Globalism Institute

Globalism Institute adalah sebuah Pusat Penelitian di RMIT University, Melbourne, Australia yang melakukan riset di berbagai lokasi di seluruh dunia yang berhubungan dengan bidang-bidang riset tematik. Globalism Institute mulai bekerja di Timor-Leste tahun 2003, dengan fokus khusus pada tema-tema keamanan (security) dan keberlanjutan (sustainability). Tema-tema ini ditarik masuk ke Global Cities Institute yang baru, yang diresmikan pada tahun 2006 untuk mengumpulkan periset-periset kunci di RMIT University untuk meneliti kerumitan seting-seting perkotaan yang sedang dalam proses menjadi global. Global Cities Institute memusatkan perhatian pada sejumlah kota-kota di wilayah Asia-Pasifik, termasuk Dili, dan proyek Community Security and Sustainability (Ketahanan dan Keberlangsungan Komunitas) yang sedang berlangsung saat ini adalah hasil langsung dari prakarsa baru tersebut. Untuk informasi lebih lanjut silakan lihat www.Timor-Leste.org

Oxfam Australia

Oxfam Australia sudah mendukung pekerjaan pembangunan jangka panjang di Timor-Leste sejak tahun 1975. Oxfam bekerja dalam kemitraan dengan dua puluh enam organisasi mitra lokal, Pemerintah, dan kelompok-kelompok masyarakat di tiga distrik untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan-layanan pokok; memastikan agar kelompok-kelompok yang terpinggirkan mendapatkan peluang untuk mengambil bagian dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka; dan mengatasi akar penyebab konflik demi membangun perdamaian yang kekal.

Pandangan-pandangan yang dinyatakan dalam terbitan ini tidak berarti mencerminkan pandangan-pandangan Oxfam.

Akronim

ADB	<i>Asian Development Bank</i> —Bank Pembangunan Asia
BPU	<i>Border Patrol Unit</i> —Unit Patroli Perbatasan
CNRT	<i>Conselho Nacional de Resistência Timorese</i> —Dewan Nasional Perlawanan Orang-orang Timor—National Council of Timorese Resistance
ECOZONE	Wilayah yang ditunjuk di dalam Oecusse di mana peraturan-peraturan khusus mengenai perpajakan, penanaman modal dan ekonomi akan berlaku.
FFSO	<i>Fundação Fatu Sinai Oecusse</i> , sebuah LSM lokal di Oecusse
FONGTIL	Forum LSM Nasional Timor Leste
ICG	<i>International Crisis Group</i> —Kelompok Krisis Internasional
INTERFET	<i>International Force for East Timor</i> —Pasukan Internasional untuk Timor Timur
MAFF	<i>Ministry of Agriculture, Fisheries and Forestry</i> —Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
NTT	Nusa Tenggara Timur
OEZDA	<i>Oecusse Economic Zone Development Authority</i> —Otoritas Pembangunan Zona Ekonomi Oecusse (badan yang sedianya akan mengawasi daerah ZEK di bawah satu model yang diusulkan)
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UNDP	<i>United Nations Development Program</i> —Program PBB untuk Pembangunan
USAID	<i>United States Agency for International Development</i> —Badan Pembangunan Internasional Pemerintah Amerika Serikat
WB	<i>World Bank</i> —Bank Dunia
ZEK	Zona Ekonomi Khusus

Daftar kata

Atoin ahunut	Penghuni asli yang menetap di sebuah daerah
Atoin amunit	Penghuni yang datang kemudian di sebuah daerah
Belis	Mas kawin (walau ini juga bisa merujuk ke pemberian atau sumbangan lain yang tidak berhubungan dengan perkawinan).
Chefe de suco	Kepala kampung/desa
Kanaf	Klan
Nael	Kepala klan
Naijuf	Kepala desa/suco
Otsus	Otonomi khusus
Pemali	Pamali, tabu, pantangan, larangan memakan makanan tertentu
<i>Tobe</i>	Pemelihara hutan ritual
<i>Usif</i>	Raja

Pengantar

Sejak kemerdekaan Timor-Leste ada berbagai macam usulan solusi-solusi atas keterisoliran Oecusse yang baru diciptakan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan pembangunan ekonomi di distrik ini. Oecusse terputus dari seluruh bagian lainnya dari Timor Leste dan dari banyak komunitas yang dengan siapa mereka memiliki ikatan-ikatan sosio-linguistik dan perdagangan, tetapi sekarang secara efektif berada 'di seberang perbatasan'. Lagi pula, akses ke wilayah ini benar-benar terbatas, hanya dengan satu feri yang menyediakan akses umum secara teratur dari Oecusse ke bagian Timor-Leste lainnya dan infrastruktur komunikasi yang buruk di dalam Oecusse. Tantangan-tantangan yang dihadapi Oecusse, sebetulnya, adalah besar sekali.

Pembahasan-pembahasan yang ada tentang pilihan-pilihan pembangunan ekonomi untuk Oecusse bisa dikelaskan ke dalam dua kategori. Yang pertama terdiri dari prakarsa-prakarsa, yang diusulkan, yang sedianya akan mendorong produktifitas dan profitabilitas dari dasar ekonomi Oecusse saat ini. Pertanian, termasuk sektor peternakan komersil, sangat menonjol dalam kategori ini, demikian pula argumentasi bahwa Oecusse perlu menghidupkan kembali industri kehutanannya yang sudah lama hilang, walaupun sepanjang batas-batas [prinsip-prinsip] keberlanjutan.

Pilihan kedua yang dibahas berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Oecusse menggambarkan sebuah keputusan substansial dengan praktek-praktek sebelumnya. Pendekatan ini pada dasarnya adalah salah satu dari penerapan berbagai macam insentif untuk menarik penanaman modal dari luar distrik, terutama sekali dari luar negeri tetapi juga dari sekelompok kecil warganegara Timor Timur yang memiliki sumberdaya untuk memulai usaha-usaha swasta. Sektor-sektor potensial yang teridentifikasi untuk penanaman modal sedemikian adalah termasuk manufaktur tingkat rendah atau tanpa ketrampilan, pemrosesan untuk ekspor, pemrosesan makanan dan minuman, dan berbagai macam model pembangunan pariwisata.

Melintasi kedua pendekatan luas tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perbatasan, yang berdampak pada kemampuan untuk pembangunan ekonomi dan juga ketentuan-ketentuan keamanan di daerah kantong (*enclave*) ini. Pembangunan ekonomi jangka panjang Oecusse akan membutuhkan satu set program terpadu yang jelas yang menangani isu-isu perdagangan dan pergerakan orang, bersamaan dengan kebijakan-kebijakan perbatasan yang jelas dan masuk akal.

Meskipun hanya minoritas populasi Oecusse memiliki pengalaman dalam kegiatan ekonomi berbasis pekerjaan formal, riset untuk laporan ini mengindikasikan sikap-sikap terhadap hampir semua bentuk penciptaan lapangan kerja sebagai sangat antusias, khususnya di antara kaum muda. Kendati demikian, indikasinya kecil bahwa biaya pembangunan masa depan—seperti kondisi-kondisi perburuhan yang eksploitatif, industri-industri *spin-off* yang menggegerkan adat dan nilai-nilai setempat, pengecualian perempuan dari lapangan kerja, dan dampak-dampak lingkungan—sudah dipertimbangkan secara memadai. Untuk berbagai macam alasan, sebuah kepekaan ala kadarnya di seputar pembahasan mengenai arah-arrah yang memungkinkan untuk pembangunan masa depan Oecusse, membuat debat semakin sulit.

Tujuan dari laporan ini terus terang adalah untuk memberikan ikhtisar ringkas tentang pembahasan-pembahasan yang ada sekarang yang berkaitan dengan pembangunan sosio-ekonomi Oecusse. Ini bukan berarti bahwa pembahasan-pembahasan tersebut adalah yang paling tepat atau harus sedemikian dominannya dalam debat publik seperti sekarang ini. Namun, melalui pembicaraan dengan sejumlah orang-orang di pemerintah, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan dari masyarakat Oecusse, ada empat isu—ketataperintahan dan otonomi, Zona Ekonomi Khusus (ZEK), pertanian dan wanatani, dan isu-isu perbatasan—yang sering dirasakan serius oleh orang-orang. Ketika menulis sebuah laporan semacam ini dalam kurun waktu yang singkat, para periset cenderung mengkonsentrasikan

waktu mereka pada orang-orang atau organisasi-organisasi yang paling banyak sumber informasi dalam masyarakat manapun, karena disinilah bentuk-bentuk informasi yang mudah diakses sudah tersedia.

Dengan demikian, laporan ini cenderung mencerminkan pandangan-pandangan dari kelompok orang tertentu—sebuah poin yang menyiratkan perlunya sebuah studi yang jauh lebih lama di Oecusse untuk memungkinkan pengumpulan sudut pandang yang lebih luas. Di dalam keterbatasan-keterbatasan tersebut, kami berharap bahwa laporan ini akan menjadi sebuah pengantar yang berguna bagi anggota-anggota pemerintahan, badan-badan pembangunan internasional dan badan-badan lainnya, komunitas donor, masyarakat umum, dan para mahasiswa yang mungkin kurang akrab dengan berbagai macam debat seputar Oecusse. Kami juga berharap bahwa laporan ini dapat digunakan untuk memahami tentang apa yang saat ini diberikan prioritas dalam kaitannya dengan wilayah maupun, dan secara sama, apa yang tidak diberikan prioritas. Kami mengerti bahwa dengan pemilihan pemerintahan yang baru pada tahun 2007 ini, banyak hal yang mungkin berubah dalam tahun-tahun mendatang. Kendati demikian, kami merasa bahwa banyak dari isu-isu yang dibahas dalam laporan ini akan terus relevan untuk masa depan yang dapat ditebak.

Lingkungan Riset

Laporan ini secara luas berbasis pada sebuah studi yang ditugaskan oleh Oxfam Australia dan dikerjakan oleh staf Globalism Institute dari RMIT University, Melbourne. Bahan-bahan dikumpulkan selama kurun waktu tiga minggu dari 12 Mei sampai 1 Juni 2007, dengan laporan awal yang disajikan ke Oxfam tidak lama sesudahnya. Laporan awal ini memiliki tujuan ganda: menyediakan studi pelingkupan terhadap isu-isu sosio-ekonomi yang terkait dengan pilihan-pilihan kebijakan perbatasan dan ekonomi di daerah kantong Oecusse; dan mengembangkan sebuah Syarat Rujukan (*Terms of Reference*) yang cocok untuk sebuah studi selanjutnya yang lebih mendalam. Selama kerangka waktu tiga minggu tersebut, para periset dari Globalism Institute berbicara dengan banyak macam orang dari sejumlah organisasi untuk mengetahui dengan pasti isu-isu dominan yang dibahas dalam masyarakat yang lebih luas mengenai kondisi-kondisi materi, prospek dan aspirasi yang membentuk kehidupan sehari-hari serta peluang-peluang dari mereka yang hidup di daerah kantong ini. Para periset juga mengkaji dokumen-dokumen yang sering sulit untuk diakses tetapi memberi penerangan pada isu-isu utama yang ada di Oecusse.

Metode-metode [riset] selalu mencerminkan lingkungan di mana riset diadakan. Timor-Leste menyajikan sejumlah tantangan bagi para periset, termasuk ketidakleluasaan yang dipaksakan oleh terbatasnya komunikasi dan infrastruktur pengangkutan; sebuah budaya yang menekankan perwujudan hubungan dan keakraban pribadi; relatif rendahnya dokumentasi resmi; jarangya materi-materi cetak dari sumber-sumber non pemerintah, seperti media; dan demikian pula, terbatasnya suplai dan aksesibilitas bahan-bahan arsip yang dipegang secara lokal. Akhirnya, bahkan bagi para periset yang ahli dalam satu atau lebih bahasa daerah, keanekaragaman bahasa di Timor-Leste dapat menambah lapisan selanjutnya dari tantangan-tantangan logistik. Tidak satu pun dari faktor-faktor tersebut membuat riset bermutu tidak mungkin, namun faktor-faktor ini mengharuskan sebuah pendekatan yang gigih, kreatif dan lentur untuk pengumpulan informasi.

Faktor tambahan lainnya untuk dipertimbangkan dalam studi yang ada ini adalah persoalan waktu—hanya beberapa minggu sebelum pemilu parlementer nasional tanggal 30 Juni 2007. Negosiasi-negosiasi bilateral tentang serangkaian isu-isu yang berkaitan dengan Oecusse yang sudah dimulai antara Indonesia dan Timor Leste tertunda dikarenakan oleh kemungkinan dibentuknya pemerintah baru Timor-Leste. Yang kedua, pejabat-pejabat pemerintah mungkin lebih berhati-hati dibanding biasanya, mengingat potensinya kepekaan dalam pemilu mengenai beberapa isu dalam pembahasan. Akhirnya, pemilu ini memiliki dampak praktis dalam meningkatkan tekanan waktu yang dihadapi oleh para anggota parlemen dan organisasi-organisasi lainnya. .

Sumber-sumber Informasi

Bersamaan dengan dokumen-dokumen yang dirujuk dalam laporan ini, serangkaian wawancara diadakan dengan berbagai macam orang. Wawancara-wawancara diminta kepada dua menteri pemerintah, yang mana kedua menteri tersebut sangat relevan untuk pembahasan-pembahasan apa pun mengenai pembangunan masa depan Oecusse: mantan Menteri Arsenio Bano (yang berasal dari Oecusse) dari Departemen Tenaga Kerja dan Solidaritas (sekarang dinamakan sebagai Kementerian Pelayanan Sosial, dan sekarang dipimpin oleh Menteri Maria Domingas Alves Fernandes) dan mantan Menteri Ana Pessoa dari Departemen Administrasi Dalam Negeri (sekarang dipimpin oleh Menteri Archangelo Leite). Sayangnya, karena jadwal mereka yang sangat sibuk dan pendeknya kerangka waktu riset ini, maka pertemuan-pertemuan pada akhirnya tidak terjadi, meskipun sebagai gantinya kantor Menteri Pessoa dengan sangat ramah mengatur sebuah wawancara makan Wakil Menteri Valentin Ximenes.

Tiga dari empat orang yang saat itu anggota Parlemen Nasional dari Oecusse—Francisco Lelan (Fretilin), Ananias do Carmo Fuka (Partidu Povo Timor atau PPT) dan Antonio da Costa Lelan (Independen)¹—diwawancarai juga. Francisco Lelan dan Ananias do Carmo Fuka diwawancarai di Parlemen Nasional, dan Antonio da Costa Lelan diwawancarai di rumahnya di Oecusse. Luisa da Costa (Fretilin) dihubungi melalui telepon dan dimintai untuk sebuah wawancara, namun demikian, dikarenakan jadwal perjalanannya maka hal ini akhirnya tidak terjadi. Jadwal perjalanan yang ketat juga mencegah terselenggaranya wawancara dengan Sekretaris Negara untuk Oecusse, Albano Salem, walaupun Penasehat Ekonominya, Richard Mounsey dari Australia, menyediakan informasi yang kaya.

Di tingkat pemerintah daerah, sejumlah pejabat ditemui, yakni Administrator Distrik Oecusse Francisco Xavier Marques dan Pejabat Pembangunan Distrik Zeferino da Cruz. Selain itu, informasi dikumpulkan sedikit demi sedikit dari perwakilan tingkat distrik masing-masing departemen dari Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (MAFF—*Ministry of Agriculture, Fisheries and Forestry*), yakni, Jose Oki, Gustodio Bobo dan Angelo Sit. Jose Anuno, seorang anggota staf lainnya dari administrasi daerah dan salah satu pengarah naskah rancangan Undang-undang tentang Otonomi Khusus untuk Oecusse (2003), memberikan masukan yang bernilai tentang sejarah dari upaya-upaya untuk mendapatkan status khusus Oecusse, sebagaimana diabadikan oleh konstitusi, dirumuskan oleh legislasi. Sebagai seorang anggota dari Partai Demokrasi (PD), beliau juga memberikan sudut pandang partai politik oposisi, demikian pula yang dilakukan Salvador da Cruz (PSD).

Brian Frantz dari USAID, Kim Hunter dari Asia Foundation, Chris Walsh dari Caritas Australia (kantor Oecusse), dan seluruh staf Oxfam Australia di Dili dan Oecusse, khususnya Herman Koopman, Waltraud Novak dan Luis Fernando, dengan murah hati menawarkan wawasan-wawasan mereka mengenai berbagai macam isu. Arno Suni berbicara baik sebagai perwakilan dari sebuah LSM lokal berbasis di Oecusse, Fundação Fatu Sinai Oecusse (FFSO)—terlibat dalam penyelenggaraan dialog lintas batas antara komunitas-komunitas di Timor-Leste dan di Timor barat wilayah Indonesia—maupun sebagai ketua sebuah kelompok pemuda Oecusse. Fatima dari Centro Feto, sebuah LSM lokal perempuan di Oecusse, membantu memberikan sebuah sudut pandang tentang bagaimana kaum perempuan di Oecusse sekiranya melihat peluang-peluang untuk mendapatkan pekerjaan berupah. Constancio Ote, editor dari koran setempat Lifau Post, memberikan sudut pandangnya tentang prospek-prospek pembangunan ekonomi Oecusse. Para pemilik toko, hotel dan restoran setempat di kota Oecusse, para pedagang di pasar-pasar Selasa Tono dan para anggota dari BPU (Border Patrol Unit — Unit Patroli Perbatasan) di Citrana juga memberikan informasi tentang isu-isu yang terkait dengan perbatasan dan perdagangan.

¹ Anggota ini dipaksa untuk mencalonkan sebagai seorang independen hanya karena suatu masalah administratif yang berakibat pada pencalonan yang terlambat sebagai seorang kandidat Fretilin. Sr Costa Lelan menjelaskan dirinya sebagai anggota Fretilin dari Parlemen untuk segala keperluan pemungutan suara.

Para pengarang ingin menyampaikan terimakasih kepada para partisipan dari pemerintah, organisasi-organisasi dan masyarakat Oecusse yang menawarkan waktu, pengalaman dan pandangan-pandangan mereka untuk studi ini. Terimakasih juga pengarang sampaikan kepada staf Oxfam di Dili dan Oecusse atas kerjasama dan bantuan mereka. Para pengarang mengapresiasi dukungan dari staf Globalism Institute yang bekerja di Timor-Leste—Carmenesa Noronha dan Mayra Walsh, dan khususnya Anna Trembath untuk kontribusinya pada laporan akhir—dan Todd Bennet di Melbourne untuk membantu dengan tata letak.

Pengantar Sosial Budaya tentang Oecusse

Oecusse, yang terdiri atas wilayah seluas 815 kilometer persegi, patut dicatat karena statusnya sebagai daerah kantong atau *enclave*. Secara geografis terpisah dari dua belas distrik lainnya yang membentuk Timor-Leste, Oecusse sepenuhnya berada di dalam sebuah daerah yang dikitari baik oleh Timor barat wilayah Indonesia atau oleh Selat Ombai. Tanpa jembatan daratan yang menghubungkannya dengan Timor-Leste sisanya, daerah kantong ini terletak kira-kira delapan puluh kilometer ke arah barat dari perbatasan internasional yang utama yang memisahkan Timor Leste dengan Timor barat² wilayah Indonesia di Batugade.

Perpisahan geografis dari Timor-Leste sisanya berasal dari pembagian Timor oleh kekuasaan kolonial Belanda dan Portugis dalam kesepakatan final tentang perbatasan yang dicapai pada tahun 1916. Menurut kesepakatan tersebut, Portugis secara formal mengakui sebagian besar dari bagian barat Timor sebagai Timor Belanda. Kendati demikian status Oecusse dipandang sebagai kekecualian dari pembagian timur-barat ini, dikarenakan arti penting historisnya bagi Portugal, khususnya sebagai situs dari pendaratan dan perkampungan pertama Portugal di Lifau dan titik kontak pertama Timor dengan agama Katolik.

Dengan terkonsentrasinya kolonialisme Portugis di bagian timur pulau Timor, banyak komunitas Oecusse termasuk diantara yang terakhir di Timor yang berhubungan dengan orang asing. Contohnya, beberapa desa pegunungan di Oecusse tidak dijangkau oleh para misionaris Portugis sampai tahun 1950an.³ Dengan demikian, titik tolak dari kontak terus menerus dengan orang-orang Eropa bagi ke desa-desa tersebut terjadi beberapa dekade belakangan dibandingkan dengan di wilayah Timor barat yang mengitari, di mana pihak Belanda telah memperluas jangkauan misionaris dan kewenangan politiknya di seluruh wilayah itu pada awal 1900an. Oleh karenanya tidak mengejutkan bahwa Anuno menggambarkan pengaruh 'akulturisasi' Portugis pada 'budaya Oecusse yang tebal' sebagai dangkal, dan sebagian besar terbatas pada urusan-urusan agama, terutama sekali perpindahan pelahan dari poligami ke monogami.⁴

Meskipun relatif merdeka dari pengaruh kolonial, wilayah ini terus memihak kepada Timor Portugis, sebuah fakta yang diam-diam diakui oleh pemerintah Indonesia ketika memegang hubungan-hubungan administratif ke kabupaten-kabupaten bagian timur, dengan membuat Oecusse menjadi bagian dari provinsi Timor-Timur.⁵ Di bawah pemerintahan Indonesia, wilayah ini tidak menerima konsentrasi sumberdaya yang sama sebagaimana wilayah Timor-Timur sisanya, mungkin hal ini membantu menjelaskan karakteristik Oecusse sekarang, seperti termasuk rendahnya angka melek huruf. Menurut satu survai, angka melek huruf Oecusse pada tahun 2001 masih hanya 31 persen, mengikuti dua puluh empat tahun pendidikan Indonesia. Angka ini adalah hanya sekitar separuh dari angka rata-rata nasional untuk Timor-Leste secara keseluruhan.⁶

Oecusse sangat menderita pada saat kekerasan paska referendum tahun 1999. Milisia di Oecusse mampu untuk terus melakukan kekerasan tanpa gangguan dalam waktu yang

² 'Timor barat' dengan huruf kecil dipakai di sini karena Timor barat tidak merujuk ke wilayah administratif atau politik mana pun di dalam Indonesia. Empat kabupaten yang terletak di Timor bagian barat—Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu—adalah bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang juga mencakup pulau Flores, Solor, Sumba, Rote dan Wetar. Ibu kota NTT adalah Kupang, yang terletak di ujung paling barat pulau Timor wilayah Indonesia.

³ Laura Meitzner Yoder, *Custom, Codification and Collaboration: Integrating the Legacies of Land and Forest Authorities in Oecusse Enclave, East Timor* (Adat, Kodifikasi dan Kolaborasi: Mengintegrasikan Warisan Kewenangan atas Lahan dan Hutan di Daerah Kantong Oecusse, Timor Timur), tesis doctoral yang tidak diterbitkan, Yale University, 2005, hal.19.

⁴ Jose Anuno (bahasa Indonesia) 'Tanpa judul', naskah buku yang tidak diterbitkan karangan seorang pengarang Oecusse tentang status, budaya dan pembangunan masa depan Oecusse, 2002, hal. 6. Bisa dilihat di www.Timor-Leste.org

⁵ *ibid*, hal.4.

⁶ The Asia Foundation, *National Survey of Voter Knowledge*, Dili, Mei 2001.



Dasar sungai Tono yang kebanyakan kering di akhir Mei 2007. Sungai ini meluap di saat musim hujan membanjiri daerah-daerah berpasir di kedua sisinya.

lebih lama dibandingkan dengan di bagian-bagian lainnya dari negeri ini disebabkan lebih lamanya waktu yang diambil oleh pasukan penjaga perdamaian INTERFET untuk tiba di sini. Hampir seluruh bangunan-bangunan umum Oecusse dihancurkan, bersamaan dengan sekitar dua pertiga perumahan penduduk. Sistem listrik dan air dibongkar dan dipindahkan ke Timor bagian barat. Barang-barang yang dicuri lainnya termasuk atap seng, panel-panel matahari (*solar panels*) dan kendaraan.⁷

Pada saat usaha untuk mengintegrasikan seluruh Timor ke dalam Indonesia berakhir pada tahun 1999, Oecusse bergabung dengan sisa wilayah Timor bekas Portugis dalam mempersiapkan kemerdekaan sebagai bagian dari Timor-Leste. Pada tahun 1996, pada saat masih di bawah pemerintahan Indonesia, populasi Oecusse secara resmi adalah 55.132 jiwa.⁸ Pada tahun 2001, mencerminkan eksodus besar-besaran para pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan, jumlah ini turun sampai 45.042 jiwa⁹, namun, dengan kembalinya para pengungsi secara bertahap, angka ini naik sampai 57.616 jiwa pada tahun 2004. Ini mewakili hampir 30 persen kenaikan dalam tiga tahun.¹⁰

Secara tradisi, hunian manusia di Oecusse selama ini terpusat di daerah pedalaman yang berbukit-bukit, daripada di dekat pantai—sebagaimana pada umumnya di seluruh Timor. Pilihan ini telah diamati sebagai karakter dari pola-pola hunian di seluruh Kepulauan Indonesia.¹¹ Berbagai banyak faktor kemungkinan sekali menyumbang pada pola-pola

⁷ UNDP, *Oecusse Integrated Development Strategy* (Strategi Pembangunan Terpadu Oecusse), 2001, hal. 15.

⁸ *Timor Timur dalam Angka 1996*, BAPPEDA Tk, I Propinsi Timor Timur dengan Kantor Statistik Propinsi Timor Timur, 1997.

⁹ East Timor Transitional Administration (Administrasi Transisi Timor Timur), ADB, World Bank dan UNDP, *The 2001 Survey of Sucos: Initial Analysis and Implications for Poverty Reduction* (Survei Suco 2001: Analisa Awal dan Implikasi dari Pengurangan Kemiskinan), 2001.

¹⁰ *Timor-Leste Census of Population and Housing 2004 Atlas* (Sensus Timor Leste tentang Atlas Perumahan dan Populasi 2004), National Statistic Directorate (Direktorat Statistik Nasional), Dili, 2006, hal.28

¹¹ Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Aceh and North Sumatra*, Singapore University Press, Singapore, 2005.

tersebut; ketinggian menawarkan pertahanan yang lebih baik dari para penyerbu, sangat rendahnya insiden malaria, dan bebas dari suhu panas daerah pantai. Ketinggian Oecusse yang lebih juga mendapatkan curah hujan yang substansial lebih besar selama musim hujan yang bisa bertahan sampai dua bulan lebih dibandingkan di garis pesisir, dan simpanan air bawah tanah lebih berlimpah.¹² Yang terakhir, dengan tidak adanya teknologi irigasi atau populasi yang besar yang membutuhkannya, pegunungan membuat penyaluran air ke budidaya skala kecil menjadi relatif sederhana.¹³

Selama masa Indonesia, sebagian dari populasi direlokasi secara paksa ke daerah pesisir antara pos perbatasan Sakato dan Citrana, dan ke dataran banjir aluvial yang letaknya rendah di sepanjang Sungai Tono di sub-distrik Pante Makassar—'lumbung beras' Oecusse.

Ini secara nyata adalah untuk memaksimalkan penggunaan lahan yang bisa diolah, tetapi juga memungkinkan kontrol yang lebih besar dari negara terhadap populasi ini.¹⁴ Sejak 1999, beberapa dari masyarakat ini telah meninggalkan dataran rendah pesisir dan kembali ke pegunungan. Dari mereka yang tidak kembali, banyak dari mereka masih memandang pegunungan sebagai pusat dari kegiatan-kegiatan keluarga, sosial dan ritual.¹⁵ Sekalipun Pante Makassar, yang termasuk ibu kota distrik, menyombongkan diri dengan populasi yang tertinggi dari keempat sub-distrik, subdistrik Oesilo dan Passabe yang lebih kecil yang terletak di daerah pegunungan tetap daerah yang paling padat penduduknya.¹⁶

Tidak banyak sekali bahan-bahan antropologi yang spesifik untuk Oecusse. Tesis doktoral Laura Meitzner Yoder baru-baru ini tentang kewenangan kehutanan negara dan tradisional adalah sebuah kekecualian yang berharga. Kendati demikian, banyak terdapat karya-karya mengenai orang-orang Atoni dari Timor barat, kelompok etno-linguistik yang mana penduduk asli Oecusse termasuk di dalamnya. Ada afinitas budaya yang dengan mudah ditegaskan antara orang-orang Oecusse dan orang-orang Atoni dari Timor barat wilayah Indonesia, sebuah koneksi yang sering dibawa melalui perkawinan dan penerusan ikatan klan. Oleh karenanya masuk akal dan sekaligus membantu untuk memanfaatkan bahan tersebut demi memahami dengan lebih baik lagi konteks sosial budaya Oecusse.

Orang-orang asli Oecusse merujuk diri mereka sebagai termasuk ke *Atoni pah Meto*, yang arti harafiahnya berarti 'orang-orang daerah kering'. Kelompok etno-linguistik ini dirujuk secara bergantian sebagai Atoni, atau Meto, dan juga mencakup mayoritas yang sangat banyak dari populasi Timor barat wilayah Indonesia. Bahasa ibu Atoni oleh Portugis dirujuk secara bergantian sebagai *baiqueno*, *uab meto* (arti harafiahnya, ucapan daerah kering) lokal atau dalam bahasa Indonesia, disebut bahasa Dawan, sebutan yang paling sering dipakai di Timor barat. Sekalipun ada beberapa dialek, dengan variasi yang banyak yang ditemukan bahkan di dalam Oecusse, Timor barat menonjolkan tingkat homogenitas etno-linguistik yang sangat jauh lebih tinggi daripada di bagian timur pulau ini.

Bahasa Baiqueno jarang dipakai sebagai bahasa tulisan, dan masih harus ditransliterasikan sepenuhnya. Bahasa Tetun semakin banyak dipakai, sedangkan bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa yang paling umum dipakai untuk menulis. Upaya-upaya untuk menghidupkan kembali penggunaan bahasa Portugis baik melalui kelas-kelas orang dewasa maupun kurikulum sekolah dasar sedang terus dilakukan dengan dukungan dari para guru Portugis. Kendati demikian, bahasa ini jarang ditemukan di luar konteks-konteks tersebut.

¹² Frederic Durand, *East Timor: a Country at the Crossroads of Asia and the Pacific: A Geo-Historical Atlas*, Silkworm Books, Bangkok, 2002, hal. 39–40.

¹³ Joachim K. Metzner, *Man and His Environment in Eastern Timor* (Manusia dan Lingkungannya di Timor bagian timur), tesis doktoral yang tidak diterbitkan, ANU, Canberra, 1977 hal. 246.

¹⁴ Wawancara dengan Louis Fernando, Petugas Mata Pencarian Ocam untuk Oecusse, Oecusse, 25 Mei 2007. Lihat juga Meitzner Yoder, *Custom, Codification, Collaboration*, hal. 20. Untuk lebih lanjut tentang tujuan-tujuan dari upaya-upaya negara Indonesia untuk meredistribusi, menempatkan dan mengumpulkan populasi yang tersebar atau bergerak, lihat James Scott, *Seeing Like a State*, Yale University Press, London, 1998, hal. 187–88.

¹⁵ Meitzner Yoder, *Custom, Codification, Collaboration*, hal. 16.

¹⁶ *Timor-Leste Census of Population and Housing 2004 Atlas*, National Statistics Directorate, Dili, 2006, hal. 26–27



Para petani setelah usai kerja, dengan latar belakang ladang berteras, Aldeia Bimano, Januari 2007

Mencerminkan kelompok-kelompok lain di seluruh Timor, masyarakat Atoni sangat patriarkhal, dan peran-peran gender ditetapkan dengan jelas dan sekaligus berdasarkan pada hubungan-hubungan konsepsional dengan alam.¹⁷ Dari sejak muda, anak-anak laki-laki belajar pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan pertanian dan pembangunan rumah, sementara anak-anak perempuan khususnya dipersiapkan untuk masa depan mereka sebagai istri dan ibu. Sekalipun sikap-sikap terhadap gender dan pendidikan di Oecusse mungkin akan berubah secara perlahan¹⁸, profil relasi-relasi gender di komunitas Atoni memberi kesan bahwa pendidikan anak laki-laki pada umumnya diberikan prioritas yang lebih tinggi.¹⁹ Dalam proses pengerjaan riset untuk laporan ini, memang tampak bahwa partisipasi dalam ruang lingkup publik lebih dibatasi bagi kaum perempuan, baik dalam artian pembuatan keputusan publik maupun peluang-peluang untuk pekerjaan yang berupah. Meskipun warisan tanah dan hak milik dalam masyarakat Oecusse pada umumnya bersifat patrilineal, Meitzner Yoder menemukan beberapa variasi dari prinsip umum ini pada masyarakat Oecusse yang tinggal di dataran rendah, di mana kepemilikan kaum perempuan atas sawah-sawah beririgasi adalah umum dan kaum laki-laki akan pindah ke rumah istri mereka pada saat menikah.²⁰

Baik pengamat setempat maupun luar telah mengamati bahwa orang-orang Oecusse sepertinya mempertahankan hubungan-hubungan yang lebih kuat ke tradisi-tradisi mereka daripada daerah-daerah lainnya di Timor-Leste, dan banyak dari penduduk Oecusse tampak sadar dan bangga dengan persepsi ini. Ekspresi visual dari hal ini yang mempesonakan kebanyakan pengunjung ke Oecusse adalah relatif tersebar luasnya pemakaian baju tradisional. Di tingkat politik, tokoh-tokoh ritual setempat masih dipuja,

¹⁷ Anuno, 'Untitled', hal.1 2. Lihat juga David Hicks, *Tetum Ghosts and Kin: Fertility and Gender in East Timor*, Waveland Press, Illinois, 1976, 2004.

¹⁸ Wawancara dengan Fatima, Centro-Feto, Oecusse, 28 Mei 2007.

¹⁹ Andrew McWilliam, *Paths of Origin, Gates of Life: A Study of Place and Precedence in Southwest Timor*, KIVTL Press, Leiden, 2000, hal. 256 57. Juga untuk sebuah studi komprehensif mengenai peran gender dalam konsep masyarakat Atoni terhadap kekuasaan dan struktur sosial, lihat Tom Therik, *The Female Land: Traditions of a Timorese Ritual Centre*, ANU Pandanus Books, Canberra, 2004.

²⁰ Meitzner Yoder, *Custom, Codification, Collaboration*, hal.101.

sebagaimana ditunjukkan pada tahun 2003 ketika masyarakat mengusulkan untuk sebuah badan formal tingkat distrik yang terdiri dari ketua adat, seperti *usif* (raja), *naijuf* (kepala kampung), *nael* (kepala klan), and *tobe* (penjaga hutan ritual), dengan keanggotaan berdasarkan pada silsilah, untuk mengawasi kepatuhan pada hukum adat di Oecusse. Perubahan nama resmi ke 'Oecusse-Ambeno' juga anjurkan untuk mengakui sejarah wilayah ini sebagai Kerajaan Beno Sila (juga dikenal sebagai Ambeno).²¹

Salah satu aspek budaya Oecusse yang paling penting untuk dipahami, khususnya dalam konteks strategi-strategi untuk pembangunan ekonomi dan sosial, adalah arti penting hubungan orang-orang dengan masa lalu. Jauh lebih banyak dari sekedar 'sejarah' atau 'kenangan', masa lalu memiliki kehadiran yang hidup dan kuat dalam pengaturan kehidupan sehari-hari di Oecusse. Salah satu studi pertama yang terperinci tentang masyarakat politik Atoni diadakan oleh Schulte Nordholt, yang menyimpulkan bahwa masa lalu mewakili sebuah 'ideal'. Masa lalu berlaku sebagai titik rujukan yang kuat bagi yang hidup, yang terus menerus mencoba menciptakan ulang kondisi-kondisi masa lalu melalui pengaturan yang 'benar' tentang kehidupan politik, sosial dan ritual.²² Walau keadaan-keadaan saat ini terus menerus mencampuri upaya-upaya ini, masa lalu terus memberi kerangka pada kehidupan sehari-hari sebagai sebuah titik orientasi sosio-budaya, yang, misalnya, memberi kerangka pada pembentukan hirarki sosial.

Pater Richard Daschbach, yang sudah tinggal diantara orang-orang pegunungan Oecusse dan Timor barat sejak tahun 1966, menggolongkan pandangan hidup orang-orang Atoni sebagai 'terpusat pada masa lalu', artinya dalam pikiran orang-orang kehidupan nenek moyang mereka sangat terlibat dalam kehidupan mereka yang hidup saat ini, memberikan pedoman dan hukuman'.²³

Khususnya mengikuti James Fox, banyak ahli antropologi yang melakukan studi tentang Indonesia bagian timur, termasuk masyarakat-masyarakat Timor barat, telah menggambarkan bagaimana struktur-struktur sosial yang 'menentukan siapa menjadi yang pertama, terkemuka, sesepuh, pemimpin, yang lebih hebat, atau yang menduduki tempat di pusat'²⁴ secara khas didasarkan pada gagasan-gagasan tentang 'apa yang sudah berjalan sebelumnya'. Dalam nada ini, Meitzner Yoder menulis bahwa tokoh-tokoh yang berwenang secara politik dan ritual pada umumnya menegaskan kekuasaan mereka melalui klaim terhadap perkampungan awal sebuah area yang tidak berpenduduk/tidak padat penduduknya (untuk *usif* – raja) atau kehadiran keturunan leluhur secara bersambung/tidak terputus yang mendahului kedatangan dari semua pesaing yang lainnya (untuk *naijuf* – kepala *suco*).²⁵ Studi kasus dari pengarang yang sama mengenai hutan pinang masyarakat di Oecusse bagian barat menyoroiti bagaimana klaim-klaim terhadap urutan perkampungan menyokong susunan-susunan yang kompleks yang mengatur hak-hak atas kepemilikan, pemeliharaan dan penggunaan lahan.²⁶ Bahasa Atoni juga mencerminkan arti penting dari preseden, dengan istilah-istilah spesifik bagi mereka yang datang menetap lebih dahulu (*atoin ahunut*) dan bagi para pendatang yang lebih baru (*atoin amunit*).²⁷

Kedudukan politik, ekonomi dan sosial seseorang di dalam komunitasnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana kehormatan keluarganya atau klannya dipandang [oleh

²¹ Jose Anuno dan Joao Muni Salo, *Draf Undang-Undang Status Khusus Enclave of Oecusse-Ambeno*, Maret 2003, Pasal 30–Lembaga Adat. Tersedia di: www.TimorLeste.org.

²² HG Schulte Nordholt, *The Political System of the Atoni of Timor*, Martins Nijhof, The Hague, 1971

²³ Meitzner Yoder, *Custom, Codification, Collaboration*, hal. 41 42

²⁴ James J Fox, 'Origin, Descent and Precedence in the Study of Austronesian society', ceramah publik, Leiden, 17 Maret 1988, dikutip di Andrew McWilliam, *Paths of Origin, Gates of Life: a Study of Place and Precedence in Southwest Timor*, KITLV Press, Leiden, 2000, hal. 8.

²⁵ Meitzner Yoder, *Custom, Codification, Collaboration*, hal. 36, 44.

²⁶ Laporan Direktorat Lahan dan Bangunan Timor-Leste, Oxfam dan GTZ, *The Customary Use and Management of Natural Resources in Timor-Leste*, Dili, Desember 2003, hal. 10 12

²⁷ McWilliam, *Paths of Origin, Gates of Life*, hal. 5.



Sebuah kendaraan Oxfam mengalami kesulitan bernegosiasi dengan tanah lapangan, Suco Taiboco, Maret 2007

komunitasnya].²⁸ Nama-nama klan (*kanaf*) diwarisi dari ayah dan diperkuat serta diperluas melalui perkawinan. Dalam masyarakat Atoni, perkawinan menyiratkan sebuah persekutuan politik antara keluarga atau golongan-golongan klan yang membawa kewajiban-kewajiban spesifik tentang pemberian, saling ketergantungan dan saling mendukung, yang dikenal sebagai *belis*. Hubungan-hubungan ini, meski kadang-kadang dilihat sebagai pemajakan, dapat juga dipandang sebagai sebuah bentuk asuransi kelaparan, penting dalam artian keberlanjutan dalam lingkungan yang sedemikian keras.²⁹

Di Oecusse, ada ketaatan *pemali*, yaitu larangan memakan makanan tertentu bagi kelompok-kelompok klan tertentu. Salah satu makanan yang paling umum dilarang adalah makanan laut, dan keseriusan mengenai *pemali*, sebagaimana ditunjukkan oleh seorang responden dalam proyek riset ini, tidak boleh dianggap enteng.

Saya seharusnya tidak makan ikan. Nenek moyang saya tidak makan ikan. Ayah saya tidak makan ikan. Tapi waktu di sekolah dasar, dan sampai sekolah menengah atas, saya makan ikan. Kami dididik (disekolah) untuk makan ikan. Tapi waktu saya menikah, ayah saya memberitahu saya 'kamu punya keluarga sekarang—kamu harus berhenti makan ikan'. Tapi saya tidak percaya dia karena saya orang cerdas, berpendidikan. Tapi, waktu saya makan ikan, saya jatuh dari sepeda motor saya, kulit saya gatal semua. Waktu saya makan ikan, saya punya mimpi jelek, dan tidak dapat pekerjaan. Saya dulu tidak mau percaya, tetapi ...itu terjadi.³⁰

[Klan-klan] lainnya tidak diperbolehkan memakan telur atau kelapa. Beberapa larangan berlaku sepanjang tahun, larangan lainnya hanya berlaku untuk beberapa bulan dalam setahun. Pengaruhnya dapat dipandang dari segi membentuk kemungkinan-kemungkinan sekarang ini untuk pembangunan di Oecusse; ini adalah satu alasan mengapa sedikit sekali kegiatan mencari ikan dilakukan oleh orang-orang dari Oecusse. Tidak hanya kecilnya

²⁸ Anuno, 'Tanpa Judul', hal.1-2

²⁹ McWilliam, *Paths of Origin, Gates of Life*, hal. 32 33, 36, 255 56. Untuk sebuah ikhtisar yang bagus sekali tentang debat-debat mutakhir di dalam masyarakat Atoni tentang manfaat dan beban yang dibuat oleh tradisi belis, lihat Rizki Fillaili & Sulton Mawardi, 'The Practice of Belis Tradition in NTT Society', dalam *SMERU Research Institute Newsletter: Development Challenges in East Nusa Tenggara*, no.20, Oct Nov 2006, hal. 25 29

³⁰ Wawancara dengan Arno Suni, FFSO (LSM lokal), Oecusse, 25 Mei 2007.

insentip untuk mengembangkan pasar-pasar tertentu, seperti misalnya pasar makanan laut, tetapi juga kecil dipandang dari segi simpanan pengetahuan secara historis yang memungkinkan hal ini terjadi dengan mudah.

Upaya-upaya untuk menambah kegiatan ekonomi di Oecusse melalui pertanian atau wanatani akan perlu menangani tantangan-tantangan iklim kering, tanah tidak subur dan topografi pegunungan yang menawarkan sedikit lahan yang rata untuk pertanian skala besar. Curah hujan di Oecusse, sebagaimana di seluruh Timor, sebagian besar terjadi dari bulan November sampai April. Meskipun daerah pegunungan terhitung lebih baik, seluruh daerah masih mengalami musim kering panjang yang mana pada saat itu rumput-rumput asli cepat menguning dan pakan ternak menjadi jarang. Dalam beberapa tahun, termasuk tahun 2007, hujannya Oecusse terlalu kecil atau terlalu telat datangnya—salah satu dari sejumlah faktor yang menyumbang pada kegagalan panen.

Menambah pada permasalahan, Oecusse memiliki sedikit sumber air permanen, dengan sebagian besar sungai berhenti mengalir dalam seminggu atau dua minggu dari curah hujan yang paling belakangan ini. Curamnya topografi tidak hanya membatasi tanah garapan tetapi juga berarti luapan dari hujan deras menghilangkan banyak tanah lapukan/tanah pucuk (*topsoil*). Tanah di Timor kekurangan timbunan terbaru dari abu gunung berapi yang ada di tanah-tanah di daerah dekat Sumbawa, Flores, Alor dan Wetar, dan pada umumnya mengandung kadar lempung, kapur dan kebasaaan yang tinggi.³¹

Masyarakat telah menyesuaikan diri pada tanah yang tidak subur dengan cara menerapkan penanaman bergilir, memungkinkan pembeeraan tanah pada saat kesuburan berkurang. Menggunakan pupuk sebagai alternatif dari penanaman bergilir biasanya tidak umum.³² Biaya dan kekhawatiran tentang efek samping menghalangi masyarakat memakai bahan-bahan kimia, dan pupuk organik sedikit diketahui serta dipandang sebagai padat karya.³³ Kendati demikian, penanaman bergilir memerlukan pembukaan tanah baru yang terus menerus, yang menjadi semakin problematik begitu populasi berkembang. Penggundulan hutan yang diakibatkannya menimbulkan salinisasi dan penipisan lebih lanjut unsur hara tanah.³⁴

Degradasi lingkungan juga diperburuk oleh berabad-abad penebangan kayu komersil, terutama sekali penebangan kayu cendana Timor yang terkenal, namun juga jati dan spesies-spesies lainnya. Meitzner Yoder memberikan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa berlainan dengan daerah-daerah lain di Timor, cadangan kayu cendana Oecusse tetap substansial pada tahun 1975.³⁵ Yoder mempertalikan anomali ini sebagian besar pada hubungan kuat yang luar biasa di Oecusse antara pejabat-pejabat Portugis dan *tobe*, dan rasa hormat yang diberikan pada kewibawaan *tobe* oleh pihak pejabat Portugis, yang menjaga pemanenan dalam kadar yang berkelanjutan. Penipisan cepat kayu cendana Oecusse terjadi di tahun-tahun permulaan integrasi Indonesia, sebagian besar didorong oleh kendali negara yang semakin bersifat memaksa, dan sering korup, atas sumber daya, dan kemudian pencabutan kekuasaan para penjaga hutan tradisional.³⁶

³¹ Joachim K Metzner, *Man and His Environment in Eastern Timor*, hal. 246.

³² Wawancara dengan Administrator Distrik Francisco Xavier Marquez, di Kantor Administrasi Distrik Oecusse, 25 Mei 2007.

³³ Komunikasi pribadi dengan Herman Koopman, Ketua Tim Oxfam, Oecusse.

³⁴ *Food Security Consultancy Recommendations Report* (Laporan Rekomendasi-rekomendasi Konsultasi Ketahanan Pangan), berdasarkan pada kunjungan lapangan ke beberapa lokasi di bawah Program Mata Pencarian Oxfam Oecusse, 26 September 2005.

³⁵ Meitzner Yoder, *Custom, Codification, Collaboration*, hal. 70-75.

³⁶ *ibid*, hal. 234-38

Pembangunan Ekonomi dan Keamanan di Oecusse

Sebagaimana dibahas pada bagian pengantar, empat tema berikutnya mewakili wacana-wacana utama yang berasal dari berbagai sumber dengan kepentingan kebijakan di Oecusse. Meski dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berbeda, dalam kenyataannya perubahan-perubahan substansial manapun dalam kebijakan di salah satu bidang-bidang ini sedianya hampir pasti memiliki pengaruh pada tema-tema lain yang disebut di sini. Contohnya, jenis perdagangan yang mungkin dikejar dalam upaya untuk semakin mengembangkan ekonomi Oecusse akan tergantung sebagian besar pada apa yang dapat dicapai dalam hal kebijakan-kebijakan perbatasan dan keamanan.

Ketataperintahan dan Otonomi

Tak peduli arah mana yang diambil dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi di Oecusse, pemerintah akan memiliki pengaruh/sangkut-paut yang signifikan dalam menentukan keluarannya. Pilihan-pilihan yang dibuat oleh pemerintah sekarang dan yang akan datang tentang dimana dan bagaimana untuk meningkatkan infrastruktur, membangun pelatihan dan pendidikan, dan menarik penanaman modal akan menjadi vital. Karena pilihan-pilihan tersebut juga mencerminkan kepentingan-kepentingan politik nasional dan daerah, maka sering ada perselisihan pendapat antara elit pusat dan daerah tentang prioritas, jadwal waktu dan metode-metode implementasi; ketegangan-ketegangan yang dapat memperpanas tuntutan untuk ketataperintahan daerah yang lebih besar lagi.

Istilah Indonesia '*otonomi khusus*' yang sudah dipakai oleh beberapa orang di Oecusse untuk mengkerangkai harapan-harapan mereka untuk pemerintahan daerah secara signifikan dipengaruhi oleh gerakan yang lebih luas lagi mengenai desentralisasi di Asia Tenggara dalam dekade terakhir. Dasar pikiran pokok dari para pendukung desentralisasi adalah

kebutuhan-kebutuhan daerah akan teridentifikasi lebih baik karena hasil dari desentralisasi, diberikan prioritas yang lebih tinggi, dan para tokoh-tokoh daerah akan secara lebih langsung berada di bawah pengawasan komunitas mereka. Prakarsa-prakarsa daerah dan energi kreatif akan juga terbebaskan oleh karena tercabutnya kendali terpusat yang mencekik...³⁷

Dalam banyak kasus, pengalaman desentralisasi yang sesungguhnya belum memenuhi klaim-klaimnya yang demokratis. Hal ini disebabkan oleh sejumlah alasan, tetapi sebagian besar dikarenakan 'tertangkapnya' proses desentralisasi oleh elit-elit daerah, sering mengakibatkan tak lebih daripada sebuah desentralisasi korupsi.³⁸

Indikasi-indikasinya adalah bahwa Timor-Leste secara hati-hati melangkah di jalur *dekonsentrasi* bertahap dari fungsi-fungsi pemerintah sebelum menyerahkan kewenangan yang sejati. Meskipun begitu, masih ada sebuah daya dorong bersama menuju otonomi khusus baik dari sumber-sumber setempat dan juga dari beberapa donor internasional. USAID, contohnya, telah mengungkapkan dukungannya untuk desentralisasi kewenangan anggaran bagi Oecusse.³⁹

Alasan-alasan utama untuk mengklaim status otonomi khusus diberikan dalam mukadimah sebuah naskah perundang-undangan yang dihasilkan dari konsultasi-konsultasi masyarakat di Oecusse sebagai: sejarah; agama dan budaya; ekonomi dan perdagangan; geografi; dan pengangkutan dan komunikasi.⁴⁰ Kesemuanya ini dibahas di bagian lain dari dokumen ini, tetapi aspek dari wacana tersebut yang menuntut perhatian ekstra adalah penekanan yang diberikan pada keunikan budaya Oecusse dibandingkan dengan distrik-distrik lainnya:

³⁷ Vedi R. Hadiz, 'Decentralisation and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo Institutional Perspectives', Southeast Asia Research Centre, City University of Hong Kong, *Working Paper Series*, no. 47, Mei 2003, hal. 16.

³⁸ *ibid*, hal.17

³⁹ USAID, 'Policy Issues for USAID: Oecusse', Dili, 25 Januari 2007.

⁴⁰ Jose Anuno dan Joao Muni Salu, *Draf Undang-Undang Status Khusus Enclave Oecusse/Ambeno, Maret, 2003: Rencana Pembentukan Daerah Administratif Khusus Oe-cusse, Oecusse, 2003*, lihat mukadimah.

Dari aspek budaya, (Oecusse) memiliki identitasnya sendiri, dengan bahasa baiqueno, kebiasaan-kebiasaan dan kewenangan-kewenangan hukum adat yang mempunyai peran mereka yang penting dalam menangani urusan-urusan domestik orang-orang Atoni [...] yang sangat berbeda dengan bahasa, kebiasaan-kebiasaan dan peran adat dalam pembangunan di daerah-daerah lain di wilayah Belos; oleh karenanya [...] [Oecusse] memiliki identitasnya sendiri yang berhak mendapatkan status khusus.⁴¹

Tuntutan-tuntutan untuk otonomi khusus secara khas dituliskan, setidaknya-tidaknnya sebagian, dipandang dari segi identitas budaya. Hal ini sering menghadirkan sebuah dilemma bagi pemerintah pusat. Di satu sisi, pengakuan atas status khusus berbasiskan pada budaya atau identitas dapat menjadi sebuah cara untuk memuaskan aspirasi daerah dan sebenarnya menjaga wilayah-wilayah di dalam domain nasional. Kendati demikian, mengingat bahwa negara Timor Timor sudah menunjukkan keterbatasan dalam hal memelihara kesatuan nasional, sebuah keprihatinan balasan mungkin bahwa pemberian otonomi ke satu wilayah pada gilirannya bisa memperlemah proyek nasional di masa depan.

International Crisis Group (ICG) telah memperingatkan bahwa jika diabaikan dan terisolir terlalu lama, maka orang-orang Oecusse 'mungkin pada akhirnya menyimpulkan bahwa kemerdekaan telah membawakan mereka tidak ada yang lain selain penderitaan.'⁴² Mengingat kekuatan dari keterikatan Oecusse ke distrik-distrik di bagian timur, peringatan sedemikian tersebut tampaknya sangat prematur pada tahap ini. Namun, pemerintah di Dili akan sangat menyadari bahwa identitas nasional tidak dapat dianggap pasti dan bahwa wacana-wacana nasionalis alternatif memang memiliki sebuah preseden baru-baru ini di bagian barat pulau ini.⁴³

Sejak kemerdekaan nasional pada tahun 2002, untuk segala kegunaan praktis Oecusse sudah diperintah dan diurus dengan cara yang sama sebagaimana dua belas distrik lainnya. Ini terlepas dari dua alinea dalam konstitusi yang menetapkan bahwa Oecusse akan diperlakukan sebagai daerah ekonomi dan administratif khusus:

Bagian 5 (Desentralisasi):

Oecusse Ambeno dan Atauro sedianya memperoleh perlakuan ekonomi dan administratif khusus.

Bagian 71 (Organisasi Administratif)

Oecusse Ambeno sedianya diperintah oleh sebuah kebijakan administratif dan rejim ekonomi yang khusus.⁴⁴

Sebelum kemerdekaan formal, sejumlah kelompok dan perseorangan Oecusse sudah meminta peraturan untuk memberikan arti dan bobot hukum atas rujukan-rujukan yang tidak diterangkan artinya dalam konstitusi tersebut. Pada bulan Juli 2002, Kongres CNRT Distrik meminta sebuah susunan 'pemerintahan' yang mana Oecusse akan menjadi sebuah provinsi daripada sekedar sebuah distrik, memungkinkannya untuk akses yang lebih besar ke pendanaan pemerintah pusat dan kendali politik atas urusannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, dianjurkan oleh Administrator Distrik, Menteri Urusan Dalam Negeri meminta sebuah Gugus Tugas Oecusse untuk mengembangkan sebuah kebijakan komprehensif yang

⁴¹ ibid. Perbedaan yang tetap ada antara orang Belos (atau Belu) di bagian timur dan orang Baiquena (di bagian barat) dapat dilacak ke pembagian Timor oleh para penjajahnya, yang membesar-besarkan kekuasaan dan jangkauan dari raja-raja asli, Belos dan Serviao, memberikan mereka sebuah justifikasi yang nyaman, keras dan bersifat fiktif atas perbatasan kolonial. Dengan jalannya waktu, sebuah kekekalan 'etnik-semu' dicangkokkan ke dalam pembagian wilayah.

⁴² ICG Policy Briefing, *Managing Tensions on the Timor-Leste/Indonesia Border*, no. 50, Jakarta/Brussels, 4 Mei 2006, hal. 9.

⁴³ Lihat, Rod Nixon, 'Indonesian West Timor: the Political Economy of Emerging Ethno Nationalism', *Journal of Contemporary Asia*, vol. 34, no. 2, 2004, hal. 163-185.

⁴⁴ *Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste*, Dili, 2002.

menangani tantangan-tantangan ketataperintahan dan ekonomi Oecusse. Kendati demikian, prakarsa ini tidak terwujudkan.⁴⁵

Pada tahun 2001, serangkaian lokakarya yang diatur oleh FONGTIL (Forum LSM Nasional) diadakan baik di Dili maupun Oecusse untuk membahas status masa depan dari distrik ini dipandang dari segi ketataperintahan, isu-isu perbatasan, perpajakan dan kemungkinan pancingan ekonomi khusus untuk penanaman modal. Berkenaan dengan ketataperintahan, pesan utama yang keluar dari lokakarya-lokakarya ini adalah adanya dukungan yang kuat bagi Oecusse untuk menjadi sebuah wilayah yang semi-otonom, dengan pemerintahan distrik mengambil tanggung jawab dan kendali atas anggarannya sendiri dan semua urusan selain dari urusan luar negeri dan pertahanan.⁴⁶

LSM-LSM lokal, Oecusse Enclave Research Forum (Forum Riset Daerah Kantong Oecusse), Oecusse Advocacy Forum (Forum Advokasi Oecusse) dan Fundação Fatu Sinai Oecusse (FFSO) juga memfasilitasi serangkaian pertemuan masyarakat untuk membahas masa depan Oecusse, dan kemudian membuat seruan untuk suatu bentuk otonomi wilayah. Sebagai jawabannya, pada tahun 2002 pemerintah pusat mengumumkan penciptaan 'Gugus Tugas Oecusse' tingkat tinggi, yang ditugasi untuk mengembangkan sebuah 'solusi holistik' untuk menangani isu-isu keamanan, perbatasan, ekonomi, komunikasi dan perdagangan.⁴⁷ Kendati demikian, tidak jelas rekomendasi-rekomendasi apa, jika toh ada, yang dihasilkan oleh kelompok ini.

Sementara itu, momentum di dalam komunitas Oecusse secara perlahan dibangun mengikuti Kongres Distrik Oecusse CNRT pada bulan Agustus 2001. Berpijak pada konsultasi-konsultasi masyarakat yang terjadi kemudian yang melibatkan pemerintah daerah, gereja, partai-partai politik, LSM-LSM, para *chefe de suco* dari seluruh delapan belas *suco* serta anggota masyarakat umum Oecusse, sebuah *Draf Undang-Undang Status Khusus Enclave Oecusse* dibuat dan dimasukkan ke pemerintah pusat pada tahun 2003. Usulan rancangan undang-undang ini sedianya akan memberikan Oecusse status provinsi (daripada distrik) dengan parlemen provinsi yang langsung dipilih sendiri, sebuah peran ketataperintahan formal bagi para *chefe de suco*, dan sebuah peran penasehat dan penyelesaian perselisihan untuk sebuah badan adat. Namun proses ini terhenti pada titik itu, dan salah seorang pembuat naskah rancangan berkata bahwa satu-satunya umpan balik yang diterima adalah 'model yang diusulkan bukan apa yang ada dalam pikiran pemerintah'.⁴⁸

Perubahan pada Struktur Ketataperintahan Daerah

Pada bulan Agustus 2005, Timor Leste dibagi ke dalam empat wilayah—timur, tengah, barat dan Oecusse—untuk kegunaan mengangkat Sekretaris-sekretaris Negara bagi masing-masing wilayah tersebut, yang melapor langsung ke kantor Perdana Menteri. Peran dari para Sekretaris Negara ini secara longgar dirumuskan sebagai sebuah 'koordinasi'. Penciptaan wilayah-wilayah baru ini tidak mempengaruhi penanganan yang terpusat dari alokasi anggaran di seluruh sektor di tingkat distrik—sebuah kekuasaan yang tetap berada di Dili. Karena baik Sekretaris Negara maupun Administrator Distrik tidak diberi informasi mengenai tingkat pendanaan yang disalurkan melalui jalur kementerian ke distrik, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mencocokkan alokasi pendanaan dengan prioritas-prioritas sebagaimana yang mereka rasakan secara daerah.⁴⁹

⁴⁵ Arsenio Bano dan Edward Rees, 'The Oecusse–Ambeno Enclave: What Does the Future Hold for this Neglected Territory?', *Inside Indonesia*, Juli September, 2002.

⁴⁶ UNDP, Oecusse Integrated Development Strategy, Dili, June 2001, hal. 9 11

⁴⁷ Bano dan Rees, 'The Oecusse–Ambeno enclave'.

⁴⁸ Wawancara dengan salah seorang pengarang naskah rancangan, Jose Anuno, Kantor Administrasi Distrik Oecusse, 28 Mei 2007.

⁴⁹ USAID, 'Policy Issues for USAID: Oecusse'.



Menjaring ikan, Maquelab, Januari 2007

Model ketataperintahan daerah yang diadopsi oleh pemerintah sebelumnya berdasarkan pada unit-unit yang dikenal sebagai *kotamadya*, yang sedianya akan mewakili tingkat baru pemerintah di Timor-Leste. Kotamadya-kotamadya ini sedianya akan diciptakan dengan membagi seluruh enam puluh lima sub-distrik yang ada menjadi antara tiga puluh sampai empat puluh kotamadya. Menurut model ini, maka kekuasaan dan fungsi-fungsi yang berpindah ke kotamadya-kotamadya tersebut akan menjadi lebih terorientasi ke arah pemberian pelayanan masyarakat yang dasar daripada kendali atas kebijakan dan anggaran, mengambil alih peran yang saat ini dimainkan oleh distrik-distrik. Di bawah model ini, *suco-suco* akan terus ada untuk memenuhi fungsi-fungsi sosial dan kemasyarakatan, tetapi tidak akan membentuk bagian dari struktur ketataperintahan yang formal.

Kriteria yang dipertimbangkan dalam menentukan batasan-batasan dari unit-unit baru ini adalah: jumlah populasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, geografi, perbedaan etno-linguistik, sejarah daerah, luas wilayah, tingkat infrastruktur (energi, pengangkutan), dan lokasi dari zona-zona industri atau komersil. Konsultasi-konsultasi masyarakat di Oecusse menentukan bahwa distrik sedianya akan memiliki dua kotamadya. Isu utama bagi masyarakat Oecusse adalah untuk memastikan bahwa pembagian ini tidak sekedar membagi distrik menjadi dua bagian, memisahkan yang kaya dan yang miskin. Menurut model ini, dua institusi baru—sebuah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih daerah dan walikota—sedianya akan dibentuk. Menurut proposal ini, hal ini berarti Oecusse akan memiliki dua dewan dan dua walikota sedemikian tadi.⁵⁰

Tidak lama sebelum pemilu 2007, proses penentuan semua batas-batas untuk kotamadya-kotamadya tersebut sudah hampir selesai, namun, persoalan tentang fungsi dan kekuasaan yang mana yang dipindahkan dan, sebetulnya, apakah pemerintah yang baru mempertahankan model ini dalam bentuknya yang ada saat ini masih harus diselesaikan. Menurut Wakil Menteri pada saat itu, Ximenes, asas-asas pokok yang memandu pendekatan pemerintah pusat terhadap isu pemindahan adalah 'sesuai dengan

⁵⁰ Wawancara dengan Wakil Menteri Administrasi Dalam Negeri, Valentin Ximenes, Dili, 16 Mei 2007.

kompetensi'.⁵¹ Komentar-komentar oleh Sekretaris Negara untuk Oecusse pada awal 2007 memberi kesan bahwa pandangan yang berlaku dalam pemerintah saat itu adalah bahwa kapasitas sumber daya manusia untuk mengurus otonomi yang luas belum ada di Oecusse—sebuah pandangan yang sangat keras ditolak dalam respon yang panjang oleh seorang penulis Oecusse.⁵²

Dua prakarsa ketataperintahan tambahan sedang dalam pertimbangan saat itu oleh pemerintah sebelumnya, keduanya unik bagi Oecusse. Prakarsa pertama adalah pengangkatan seorang menteri khusus untuk Oecusse dari pemerintah pusat. Pemegang jabatan sedianya akan tinggal di Oecusse dan bertugas untuk menemukan solusi-solusi untuk tantangan-tantangan spesifik Oecusse. Menteri tersebut tidak akan terlibat dalam pengawasan kerja sehari-hari pemerintah daerah, tetapi lebih ke memimpin sebuah dewan khusus, kemungkinan terdiri dari sekretaris negara, dua walikota, perwakilan sektor swasta, perwakilan asosiasi-asosiasi bisnis dan industri, dan juga perwakilan LSM atau masyarakat sipil.⁵³

Terlepas dari menteri dan dewan khusus tersebut, akan tampak bahwa jika model yang ada saat ini untuk ketataperintahan daerah dipertahankan oleh pemerintah baru yang dipimpin oleh Xanana Gusmão, maka struktur ketataperintahan dasar Oecusse akan tetap dalam bentuk yang identik dengan dua belas distrik lainnya. Tentu saja ada kemungkinan bahwa dua kotamadya Oecusse dapat diberi kekuasaan yang bertambah dibandingkan dengan distrik-distrik lainnya. Kendati demikian, dalam ketiadaan sebuah pemerintah tingkat formal yang yurisdiksinya mencerminkan batasan-batasan dari seluruh daerah kantong ini, maka jenis otonomi yang luas jangkauannya yang sudah diharapkan oleh beberapa anggota masyarakat Oecusse tampaknya tidak mungkin.

Penanaman Modal Asing dan Zona Ekonomi Khusus

Sejak tahun 1999, tema yang konsisten di seputar Oecusse terpusat pada dua persepsi: bahwa menstimulir kegiatan ekonomi di distrik ini akan memerlukan penanaman modal asing, dan bahwa berbagai langkah-langkah khusus akan dibutuhkan untuk membuat Oecusse menarik bagi para penanam modal potensial. Pertama kalinya sebutan Zona Ekonomi Khusus (ZEK) muncul pada bulan Juni 2000 dari Administrasi Distrik internasional yang 'menghendaki rejim perbatasan lunak dengan Indonesia, pengurangan nilai pajak dan tariff, dan kode-kode lahan dan ketenagakerjaan yang khas'. [Usulan] ini memberikan alasan-alasan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut akan memungkinkan Oecusse untuk mengintegrasikan dirinya secara lebih baik dengan pasar sebesar 1.2 juta orang di Timor bagian barat.⁵⁴

Menulis pada tahun 2001, James Fox menyimak bahwa Oecusse sudah sangat buruk sekali menderita sebagai konsekuensi dari pengerasan perbatasan dengan Timor bagian barat, dan mengusulkan bahwa jika dibuat sebuah 'pelabuhan bebas', maka Oecusse dapat menjadi 'pusat perdagangan untuk pembangunan baik Timor Timur maupun Timor Barat.'⁵⁵ Manfaat-manfaat yang dirasakan dari sebuah ZEK bagi Oecusse juga dibahas dalam lokakarya-lokakarya masyarakat yang diselenggarakan oleh FONGTIL pada tahun 2001.⁵⁶

⁵¹ *ibid.*

⁵² Regio da Cruz Salumata, 'Spesial status dan otonomi khusus kepada Oecusse enclave untuk mengaturnya merupakan sesuatu entitas logis', *Suara Timor Lorosae*, (seri tulisan dalam delapan bagian, mulai 21 Mei 2007).

⁵³ *ibid.*

⁵⁴ Bano dan Rees, 'The Oecusse-Ambeno enclave'.

⁵⁵ James J. Fox, 'Diversity and Differential Development in East Timor: Potential Problems and Future Possibilities', dalam Hal Hill dan Joao Saldhana, eds, *East Timor: Development Challenges for the World's Newest Nation*, ISEAS, Singapore, 2001, hal. 171.

⁵⁶ UNDP, *Oecusse Integrated Development Strategy*, Juni 2001. Lokakarya-lokakarya ini diselenggarakan oleh Administrasi Distrik dalam kerjasama dengan FONGTIL.



Sebagian besar padi Oecusse tumbuh di tanah yang terhitung subur di dataran aluvial di sepanjang bagian yang lebih rendah dari Sungai Tono, Mei 2007

Pada tahun yang sama, Hadi Soesastro⁵⁷ juga menulis secara optimis tentang kemungkinan-kemungkinan bagi Timor-Leste sebagai sebuah kesatuan dalam mengikuti jalur ZEK. Kendati demikian dengan memberikan label pada jejak menuju pembangunan ekonomi ini sebagai 'model Singapura', Soesastro tampaknya menolak perbedaan yang sangat besar dalam hal sejarah, geografis dan budaya antara dua negara ini. Yang paling jelas terlihat dari hal ini adalah baik Timor-Leste sebagai kesatuan, maupun Oecusse khususnya, tidak menikmati posisi strategis yang dimiliki Singapura. Perbedaan yang jelas dalam tingkat ketrampilan tenaga kerja dan infrastruktur juga menjadikan perbandingan ini sebagai perbandingan yang agak buruk.

Tantangan membangkitkan penanaman modal di Oecusse ini, entah itu asing maupun domestik, tidak hanya berkaitan dengan isu-isu yang spesifik wilayah ini tetapi juga rintangan-rintangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Timor-Leste pada umumnya. Laporan *Doing Business* (Melakukan Bisnis) yang paling baru dari Bank Dunia mendudukkan Timor-Leste pada urutan ke-174 dari 175 negara untuk kemudahan melakukan bisnis. Secara rata-rata, saat ini diperlukan sembilan puluh dua hari dan hampir delapan kali pendapatan per kapita untuk memulai suatu bisnis di Timor-Leste.⁵⁸ Masalah-masalah yang berskala nasional, seperti listrik (dibatasi sampai beberapa jam setiap malam dan hanya di kota Oecusse) dan ketergantungan pada jaringan telepon mobil yang mahal adalah kesukaran-kesukaran selanjutnya bagi penanaman modal dan komunikasi pada umumnya. Pengangkutan terbatas oleh sejumlah faktor, terutamanya dikarenakan oleh isu-isu perbatasan, yang pada gilirannya menciptakan ketergantungan yang hampir sepenuhnya pada layanan feri ke Dili. Lebih jauh lagi, keterisoliran ini diperburuk lagi dengan jalan-jalan dan jembatan-jembatan negara yang buruk di dalam Oecusse, serta tidak adanya fasilitas bandara dan penerbangan komersil.

⁵⁷ Hadi Soesastro, 'East Timor's Economic Relations with Indonesia', dalam Hal Hill and Joao Saldanha, eds, *East Timor: Development Challenges for the World's Newest Nation*, Singapore, ISEAS, 2001, hal. 89

⁵⁸ USAID, 'Policy Issues for USAID: Oecusse'.

Saat ini, kegiatan penanaman modal di Oecusse terbatas pada segenggam toko-toko serba ada dan tiga hotel-restoran kecil yang terpusat di ibu kota distrik, kendati demikian, eberapa langkah positif telah diambil untuk mendorong kegiatan dan pengintegrasian ekonomi lokal dalam wilayah ini. Hal ini termasuk penyediaan layanan perbankan dan sebuah kantor pemerintah untuk pendaftaran bisnis bagi usaha-usaha kecil di Oecusse baru-baru ini. Langkah-langkah juga dibuat menuju penciptaan sebuah Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Ekonomi antara Oecusse dan pemerintah Nusa Tenggara Timur, berpusat di Kupang. Lalu pada bulan November 2006, Sekretaris Negara untuk Oecusse, Albano Salem, dan Administrator Distrik, Francisco Xavier Marques, memimpin sebuah delegasi bisnis yang terdiri dari empat orang pebisnis setempat dalam sebuah tur ke pusat-pusat utama di Timor bagian barat. Penasehat internasional dari Sekretaris Negara melaporkan bahwa misi ini 'disambut dengan tangan terbuka' dan meningkatkan perdagangan sah masuk ke Oecusse sebanyak sepuluh kali lipat.⁵⁹

Satu industri yang sudah digembar-gemborkan sebagai memiliki potensi penanaman modal adalah pariwisata, yang tentu saja dapat berarti banyak hal yang berbeda. Oecusse memiliki beberapa pengalaman sebelumnya dalam pariwisata selama era Indonesia, tetapi ini relatif dalam ukuran kecil, melayani terutama para birokrat Indonesia dan jumlah kecil kelas menengah dari kota-kota pedalaman yang utama di Timor bagian barat, seperti Atambua dan Kefamenanu. Meskipun desas-desus tentang pembangunan kasino yang diperbincangkan untuk Oecusse kadang-kadang sudah muncul, tampaknya kecil kemungkinan pembangunan semacam ini akan mudah diterima oleh masyarakat maupun gereja. Sebuah bar kecil beroperasi di pantai di kota Oecusse sudah menjadi obyek dari berbagai protes tentang penempatannya dan kelayakannya secara budaya, dikarenakan oleh hubungan-hubungan yang umum antara bar dan hotel dengan pelacuran dan 'seks bebas'.

Di ujung lainnya dari spektrum ini adalah operasi-operasi yang dimiliki, dikelola dan ber staf orang-orang setempat yang bermaksud untuk peka secara lingkungan dan budaya, seperti model Eco Lodge yang dipakai di Pulau Atauro. Sepanjang garis pantainya kebanyakan disusuri oleh batu karang, menawarkan beberapa potensi *scuba* dan *snorkeling*.

Jika solusi untuk isu-isu perbatasan dapat ditemukan, yang mana memungkinkan perjalanan darat yang relatif bebas dari hal-hal yang menjengkelkan dari Dili, maka Oecusse mungkin mampu untuk memasarkan dirinya sendirinya sebagai sebuah tujuan liburan bagi orang-orang Timor yang lebih bergerak dan para ekspat yang tinggal di Dili. Feri satu-satunya yang ada, walaupun nyaman, hanya beroperasi dua kali seminggu, yang tidak memungkinkan untuk perjalanan akhir pekan, sebagaimana Atauro. Persyaratan bagi wisatawan Indonesia untuk membayar US\$ 30 (tiga puluh dolar Amerika) untuk visa adalah sebuah dis-insentip (hal yang tidak merangsang) bagi para wisatawan Indonesia potensial dari Atambua, Kupang dan Kefamenanu. Kendati demikian, mempertimbangkan kecilnya jumlah wisatawan asing berkunjung ke Flores yang berada di dekatnya, maka prospek untuk menarik jumlah yang signifikan dari wisatawan internasional dari tempat yang lebih jauh tampaknya terbatas.

Bagi orang-orang Oecusse untuk mendapatkan pekerjaan di sektor pariwisata, atau sebetulnya manufakturing, maka akan perlu kebutuhan mendesak untuk pelatihan ketrampilan. Pembahasan lebih banyak juga diperlukan untuk membentuk sikap-sikap masyarakat terhadap pariwisata dan untuk menangani isu-isu sosial potensial, terutama sekali jika kepemilikan dan kendali akan berada di tangan orang luar.

Secara keseluruhan, pembahasan-pembahasan mengenai langkah-langkah untuk memikat penanaman modal asing ke Oecusse mendapatkan dukungan yang antusias dari berbagai macam aktor, termasuk anggota parlemen dari Oecusse (baik pihak pemerintah maupun pihak oposisi), Sekretaris Negara untuk Oecusse, administrasi distrik, para perwakilan LSM yang berbasis di Oecusse, sejumlah kecil pemilik bisnis dan pedagang pasar Oecusse.

⁵⁹ Wawancara dengan Richard Mounsey, Kantor Administrator Distrik Oecusse, 24 Mei 2007.

Begitu tingginya minat diantara orang-orang Oecusse terhadap rencana manapun untuk mendorong perekonomian, sehingga pada tahap ini kekhawatiran-kekhawatiran tentang kemungkinan konsekwensi-konsekwensi negatif sebagian besar tidak dapat dideteksi. Dengan dorongan semangat, beberapa informan mampu mengemukakan kesadaran tentang dampak-dampak negatif yang mungkin, tetapi secara keseluruhan, dengan protes bahwa orang-orang lokal Oecusse harus diberikan pilihan pertama untuk pekerjaan, maka manfaat dari menarik penanaman modal asing dirasakan terlalu tidak seimbang dengan biayanya. Perlu ditekankan bahwa pandangan-pandangan yang dikaji secara detil ini pada tahap ini sebagian besar mencerminkan pandangan mereka yang elit berpendidikan yang memegang posisi formal, baik dalam pemerintahan maupun LSM-LSM.

Sebuah ZEK di Oecusse

Sebuah Naskah Rancangan Undang-Undang Organik Mendeklarasikan Oecusse sebagai suatu Zona Ekonomi Khusus (*Draft Organic Act Declaring Oecusse as a Special Economic Zone*) baru-baru ini telah dipersiapkan oleh Sekretaris Negara untuk Oecusse dengan bantuan dari penasehatnya.⁶⁰ Sebelumnya pada tahun awal 2007, naskah rancangan ini menunggu revisi sebelum dimasukkan ke parlemen untuk debat. Jika disetujui oleh parlemen, Undang-undang yang digambarkan dalam naskah tersebut akan membentuk OEZDA (*Oecusse Economic Zone Designated Authority*—Otoritas yang Ditunjuk untuk Zona Ekonomi Oecusse), yang akan dikepalai oleh Sekretaris Negara untuk Oecusse atau oleh Menteri Wilayah untuk Oecusse. (Lihat bagian tentang Ketataperintahan dan otonomi). OEZDA akan bertanggung jawab untuk mengurus sebuah ECOZONE (zona ekonomi) yang ditetapkan yang meliputi sebuah wilayah yang ditunjuk *di dalam* Oecusse (yang akan mengecualikan tanah 'nenek moyang' atau 'milik adat'), untuk dibangun menjadi 'sebuah pusat yang swadaya, percaya diri dan terpusat' untuk kegiatan agro-industri, industri, perdagangan, pariwisata, perumahan, komunikasi, perbankan, keuangan dan penanaman modal.⁶¹

Menurut rencana tersebut, isu-isu ketenagakerjaan akan diatur berdasarkan sebuah kitab undang-undang khusus, yang sedianya akan 'mencerminkan tujuan, niatan, maksud dan tujuan-tujuan khusus untuk Oecusse sebagai sebuah ZEK'. Tidak akan ada pajak yang diterapkan pada barang-barang impor maupun ekspor yang mengalir ke atau dari ECOZONE, dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam zona ini akan menikmati libur-pajak sepenuhnya selama lima tahun pertama.⁶² OEZDA sedianya juga akan diberdayakan untuk membuahkannya sendiri Kitab Undang-Undang Korporasi, Kitab Undang-Undang Perdagangan dan Kitab Undang-Undang Penanaman Modal, walau ini semua akan perlu membutuhkan persetujuan legislatif dari Parlemen Nasional. Naskah tersebut mengakomodir keprihatinan-keprihatinan daerah bahwa orang-orang Oecusse diberikan prioritas untuk pekerjaan, di mana mereka memiliki ketrampilan yang diperlukan.⁶³ Kendati demikian, jika para penanam modal dapat menghindari penggunaan tenaga kerja daerah dengan beralih kurang ketrampilan, maka orang-orang Oecusse mungkin tidak memperoleh manfaat sebanyak yang mereka harapkan.

Tingkat kesuksesan yang dapat dicapai insentip-insentip tersebut dalam menarik para penanam modal ke Oecusse akan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk ketersediaan infrastruktur yang pokok, seperti jalan, pelabuhan, bandara, listrik, suplai air dan telekomunikasi—yang mana tak satupun ada saat ini dalam tingkat yang dibutuhkan. Walaupun demikian, pertanyaan tetap ada mengenai apakah Oecusse akan dipandang menarik oleh para penanam modal, bahkan jika infrastruktur dan insentip ada pada tempatnya.

⁶⁰ *Draft Organic Act Declaring Oecusse as a Special Economic Zone*, Office of the Secretary of State for Oecusse (Draft Undang-Undang Organik Mendeklarasikan Oecusse sebagai suatu Zona Ekonomi Khusus, Kantor Sekretaris Negara untuk Oecusse), 2007

⁶¹ *ibid.*

⁶² *ibid.*

⁶³ *ibid.*

Jika Oecusse memiliki kelebihan alamiah apa pun itu, maka kemungkinannya kelebihan itu adalah proksimitas atau kedekatan lokasinya dengan Indonesia. Sejumlah penanam modal Indonesia telah menunjukkan minat pada Oecusse sebagai lokasi potensial untuk pemrosesan atau tempat produksi di luar Indonesia (*off-shore*) untuk semen, rokok, ternak, manufaktur, jaring penangkap ikan dan bir. Mungkin satu kelebihan dari pengoperasian di Timor-Leste adalah hal ini akan menghindari peraturan-peraturan Indonesia yang melarang merek-merek baru dari produk-produk tertentu dibuat di Indonesia untuk konsumsi domestik. Produksi di luar Indonesia akan memungkinkan produk-produk dipasarkan di Indonesia sebagai merek luar negeri.⁶⁴

Pertanian dan Wanatani

Mayoritas yang sangat banyak dari orang-orang Oecusse selama ini selalu tergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian mereka. Praktek pertanian Oecusse sangat benar-benar cenderung mengarah ke model subsisten, dan pasar-pasar tradisional umumnya mengutamakan tukar-menukar barang atau barter sebagai cara bertransaksi. Sebagai akibatnya, banyak keluarga Oecusse hanya secara marjinal terintegrasi ke dalam ekonomi tunai. Mencerminkan hal ini, maka wacana pembangunan ekonomi dari badan-badan bantuan internasional dan LSM Internasional cenderung berfokus pada melibatkan diri dengan produsen makanan skala kecil. Keterlibatan ini pada pokoknya memiliki dua tujuan: untuk meningkatkan ketahanan pangan demi mengatasi musim lapar yang terjadi kira-kira dari bulan November sampai bulan Maret, dan untuk mengidentifikasi komoditi pertanian yang dapat menghasilkan surplus yang menguntungkan bagi pasar.

Para petugas penyuluh pertanian dari LSM-LSM Internasional di Oecusse benar-benar sadar mengenai skeptisisme dan perlawanan dari banyak petani Atoni terhadap usaha-usaha untuk memperkenalkan perubahan pertanian. Bergantung pada keluaran pertanian mereka sendiri untuk memenuhi konsumsi mereka sendiri, sebagian besar petani Oecusse menanam berbagai macam tanaman dalam jumlah kecil pada waktu yang berlainan sebagai sebuah strategi pengelolaan resiko untuk berjaga-jaga dari kemungkinan gagal panen total.⁶⁵ Gaya pertanian semacam ini meningkatkan beban kerja bagi unit keluarga yang bersangkutan.⁶⁶ Sebagaimana dijelaskan oleh Administrator Distrik Oecusse: 'Para petani di sini senang untuk bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri kebutuhan sehari-hari mereka; mereka berpikir bahwa untuk bisa hidup, maka mereka harus memiliki (dalam tanaman dan ternak mereka) semua kebutuhan dasar mereka.'⁶⁷

Meski kurangnya pengintegrasian ke dalam ekonomi tunai juga benar selama jaman Indonesia, insentif untuk berpartisipasi dalam ekonomi tunai melalui produksi pangan semakin menurun dengan kemerdekaan, sebagai akibat dari isu perbatasan yang sekarang membatasi akses ke pasar-pasar dan penurunan substansial dalam daya beli para pegawai negeri, yang jumlahnya jauh berkurang. Secara lebih luas, yang mungkin dimengerti sebagai sebuah sikap mendua yang nyata dari orang-orang Atoni terhadap pengintegrasian praktek pertanian ke dalam pasar dapat juga dijelaskan dengan dis-insentif yang dimunculkan oleh kewajiban-kewajiban keluarga dan adat istiadat. Sistem budaya setempat dapat memaksa orang untuk berbagi kelebihan dengan keluarga besar—sebuah sistem yang mungkin berkembang sebagai respon terhadap kekurangan pangan.⁶⁸ Meski ini mungkin

⁶⁴ Wawancara dengan Penasehat Internasional untuk Sekretaris Negara untuk Oecusse, Richard Mounsey, Kantor Administrasi Distrik Oecusse, 24 Mei 2007.

⁶⁵ Wawancara dengan Herman Koopman, Oxfam dan Chris Walsh, Caritas Australia, Oecusse, 22 Mei 2007.

⁶⁶ McWilliam, *Paths of Origin, Gates of Life*, hal. 36.

⁶⁷ Wawancara dengan Administrator Distrik Oecusse, Francisco Xavier Marques, di Kantor Administrasi Distrik Oecusse, 25 Mei 2007. Beberapa pandangan yang mirip diberikan dalam wawancara dengan staf Oxfam di Oecusse.

⁶⁸ FJ Ormeling, *The Timor Problem: A Geological Interpretation of an Underdeveloped Island*, AMS Press, New York, 1956. Juga, wawancara dengan Chris Walsh, Caritas Australia. Lihat juga James Fox, 'The Historical Consequences of Changing Patterns of Livelihood on Timor', dalam Deborah Wade Marshall dan Peter Loveday, eds, *Northern Australia, Progress and Prospects: Contemporary Issues in Development*, ANU, Darwin, 1988; Andrew McWilliam,



Petugas kepolisian BPU (Border Patrol Unit) sedang bertugas di pos perbatasan Citrana yang terletak di sisi paling barat Oecusse di titik di mana perbatasan bertemu dengan garis pantai, Mei 2007

berjalan baik dalam sistem sosial pertanian-tradisional yang berbasis pada sistem timbal-balik, hal ini tidak secara otomatis cocok dengan prakarsa-prakarsa berbasis pasar dan penggunaan kekayaan perorangan sesuai dengan upaya perorangan. Selain itu, kewajiban-kewajiban adat, yang dapat menciptakan hutang yang bisa diwariskan, sering adalah sebuah beban yang dirasakan sangat berat oleh mereka yang rentan, dengan pemenuhan, baik itu dalam bentuk barang/hasil bumi atau dalam bentuk tenaga, yang merupakan pengosongan besar dalam sumber daya rumah tangga.⁶⁹

Apa yang tidak ada dari kebanyakan literatur pembangunan adalah penjajagan tentang alasan-alasan yang melatarbelakangi perlawanan terhadap teknologi baru, seperti misalnya penggunaan dam-dam dari tanah. Respon-respon saat ini terhadap teknologi pertanian yang baru diperkenalkan perlu dilihat dari konteks pengalaman negatif para petani dengan program-program pembangunan yang lalu. Dalam hal program penyuluhan pertanian yang diimplementasikan oleh negara Indonesia dari akhir tahun 1970an sampai 1999 di Oecusse, banyak program-program ini gagal sekalipun pembelanjaan negara besar sekali, hal ini dikarenakan kurangnya konsultasi yang memadai untuk memahami tentang kebutuhan para petani maupun tentang berbagai faktor yang menginformasikan praktek-praktek yang ada.⁷⁰

Ada sebuah konsensus umum di antara LSM-LSM dan pemerintah daerah, bahwa jika para petani Oecusse akan meningkatkan mata pencaharian materiil mereka melalui pertanian,

'Strategies for Subsistence in West Timor', dalam jilid yang sama; and Andrew McWilliam, 'Development Technologies and the Classification of Strangers in West Timor', dalam Lorraine V. Aragon dan Susan D. Russell, eds, *Structuralism's Transformations: Order and Revision in Indonesia and Malaysian Societies*, Arizona State University, Tempe, 1999.

⁶⁹ Komunikasi pribadi dengan Herman Koopman.

⁷⁰ Andrew McWilliam, 'Rhetoric and Reticence, Notes on the Anthropology of Development in West Timor', *Journal of Asian and African Studies*, vol. 2, 1995, hal. 138-150.

maka mereka perlu menemukan cara untuk memproduksi satu atau dua komoditi dalam jumlah yang memadai untuk ekspor. Berbagai tanaman pangan sudah diusulkan sebagai memiliki potensi tersebut, termasuk kacang tanah, kacang mete, kedele, kacang hijau dan bawang (Bombay) putih. Minat pada kacang mete sudah ditunjukkan sampai sejauh India. Tanaman dengan pasar tertentu seperti lidah buaya (*aloe vera*), yang tumbuh secara alamiah di Timor, juga dapat dijajagi.⁷¹

Peternakan

Di Oecusse, tanaman pangan ditambah dengan aset/kepemilikan berbagai macam ternak, yakni sapi, ayam, babi, kambing dan kerbau. Sejak berakhirnya industri kayu cendana, sapi adalah satu-satunya ekspor yang signifikan dari Oecusse. Orang-orang jarang membunuh sapi untuk dimakan oleh mereka sendiri, lebih memilih menggunakannya untuk menyimpan kekayaan sedikit demi sedikit, yang kemudian dapat diambil untuk membayar mas kawin, dan sebagai sebuah bentuk asuransi terhadap kekurangan pangan musiman. Pada tahun 2001, UNDP mengestimasi bahwa 65 persen keluarga memelihara sapi Bali.⁷²

Sebelum kemerdekaan, pasar-pasar utama untuk ternak sapi adalah Dili dan pusat-pusat populasi yang besar di Timor bagian barat, seperti Atambua, Kefamenanu dan Kupang. Kendati demikian, dengan penutupan efektif perbatasan darat Oecusse, maka pasar-pasar untuk para pedagang sapi Oecusse menjadi semakin tidak dapat diakses. Biaya pengapalan (ongkos feri \$12 (dua belas dolar) untuk satu hewan dan \$8 (delapan dolar) untuk pemilikinya), masalah dalam menemukan pakan untuk hewan ini di Dili pada saat mencari pembeli, dan masalah-masalah yang dilaporkan tentang memperoleh pembayaran kalau memakai makelar membuat pasar ini menjadi kurang menarik.

Sebagai konsekuensinya, sebagian besar pemilik ternak sapi memilih untuk (secara ilegal) mencari pembeli di seberang perbatasan di antara komunitas-komunitas yang berdekatan di Timor bagian barat. Sertifikasi dokter hewan, yang disyaratkan secara hukum untuk penjualan ternak, sulit diperoleh karena satu-satunya dokter hewan yang menyediakan layanan ini berkantor di Dili dan hanya melakukan perjalanan distrik-distrik lain berdasarkan permintaan. Mengingat keterbatasan pilihan-pilihan yang ada bagi para penjual Oecusse, maka kelihatannya keuntungan dari apapun bentuk transaksi ternak sapi lintas-batas benar-benar berada pada sisi pembeli, yang dapat sebaliknya mencari ternak sapi dari dalam daerah Timor bagian barat, Covalima, Bobonaro atau Dili. Hal ini membantu menjelaskan mengapa penjualan ternak sapi dari Oecusse menjadi sangat berkurang sampai kecil sekali dibandingkan dengan volume yang sebelumnya.⁷³

Wanatani

Langkah-langkah untuk menghidupkan kembali industri wanatani sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan telah didorong oleh para donor dan LSM yang menekankan manfaat ganda dari menyediakan sumber penghasilan masa depan sambil mengatasi masalah-masalah lingkungan yang serius, seperti erosi dan buruknya daya tanah dalam menyimpan air.⁷⁴ Kendati demikian, reforestasi (penghutanan kembali) akan berarti mengembalikan sebuah tren yang sudah dalam pergerakan selama berabad-abadan dan yang bertambah cepat pada akhir abad sebelumnya. Sebuah studi bersama pada tahun 2001 yang dilakukan oleh UNDP dan Norwegian Institute for Nature Research (Institut Norwegia untuk

⁷¹ Wawancara dengan Chris Walsh dan Herman Koopman. 22 Mei 2007. Untuk catatan sejarah tentang pengenalan/masuknya dan penyebaran berbagai jenis tanaman yang saat ini ditemukan di Timor, lihat James Fox, 'Drawing from the Past to Prepare for the Future: Responding to the Challenges of Food Security in East Timor', dalam *Agriculture: New Directions for a New Nation*, East Timor, UNTL, ANU, G RDTL, Dili, 2002, hal. 105-114.

⁷² UNDP, *Oecusse Integrated Development Report*, hal.15.

⁷³ Wawancara dengan staf Oxfam Oecusse, Herman Koopman dan Luis Fernando, Dili, 17 Mei 2007.

⁷⁴ Rilis Berita USAID, 'US Diplomat Visits Oecusse, Urges Action to Help the Enclave', Dili, 6 Februari 2007.

Penelitian Alam), menggunakan pencitraan satelit untuk mengkalkulasi bahwa tutupan hutan secara nasional berkurang sebanyak 30 persen antara tahun 1972 sampai 1999.⁷⁵

Dalam sebuah prakarsa positif yang mengkombinasikan hukum adat dan hukum negara, para tokoh masyarakat dan pemerintah daerah sudah mulai bekerja sama untuk memberantas penebangan hutan di Oecusse, dengan cara melarang penebangan beberapa jenis tertentu yang dilindungi—jati, asam, jambu mawar, kayu putih, kayu merah (*Pterocarpus*), nismetan/ketapang (*Terminalia*) dan nitas (*Stercolia*)—dan memberdayakan pihak berwenang adat untuk menegakkan larangan-larangan tersebut.⁷⁶ Namun, membangun sebuah industri wanatani, akan jelas-jelas memerlukan lebih daripada larangan. Ini akan memerlukan para petani perorangan untuk dibujuk bahwa mengalokasikan sebagian dari tanah pribadi mereka untuk menanam pohon (yang akan memerlukan minimal beberapa tahun untuk memberikan hasil) adalah sebuah penanaman modal yang sehat.

Yang membesarkan hati, jika isu-isu tekanan sosial dan lahan dapat diatasi, iklim yang keras di Oecusse dipercaya memiliki pengaruh yang positif pada kualitas jenis kayu keras, seperti jati. Terlepas dari kemungkinan menghidupkan kembali industri kayu cendana, calon-calon lain untuk produk kayu non pangan yang memberikan pengembalian modal yang cepat (tiga tahun) termasuk: pohon mindi/nimbo (*Azadirachta indica*), yang memiliki khasiat anti serangga alamiah, turi, gamal, lamtoro/lamtara, dan satu jenis bambu berkualitas tinggi yang bisa memperbanyak sendiri yang dikenal sebagai bambu betung.⁷⁷

Perbatasan Oecusse

Isu-isu perbatasan sangat kerap dimunculkan oleh para responden, bukan setidaknya-tidaknya karena isu ini memunculkan pertanyaan di seputar mata pencaharian ekonomi, hubungan-hubungan keluarga dan budaya, keamanan dan integrasi nasional. Bukan hanya karena penduduk Oecusse bergantung pada perdagangan lintas batas untuk suplai bahan-bahan pokok; perbatasan ini juga menyajikan sebuah perubahan geo-teritorial yang memisahkan ikatan-ikatan budaya, kekerabatan dan keluarga yang sangat dipegang kuat dengan komunitas di Timor bagian barat. Sejak kemerdekaan, perbatasan ini telah semakin menjadi rintangan yang tidak bisa ditembus.

Sebelum penyerbuan dan pendudukan oleh Indonesia pada tahun 1975, para penduduk desa Oecusse mampu berdagang relatif tanpa beban melintasi perbatasan, kadang-kadang dengan pembayaran biaya nominal untuk petugas perbatasan. Pada saat Oecusse secara formal menjadi bagian Indonesia, perbatasan tetap mudah dilalui; ia sekedar memisahkan batas antara provinsi baru Timor-Timur, yang mana Oecusse termasuk di dalamnya, dengan provinsi Indonesia sebelahnya, yakni Nusa Tenggara Timur. Pembangunan jalan-jalan dan jembatan-jembatan baru semakin mempermudah pertukaran dan akses lintas batas selama periode tersebut.

Terlepas dari keprihatinan-keprihatinan yang mungkin tentang ancaman yang tetap ada dari milisia, praktek pra-kemerdekaan dari orang-orang Oecusse yang melakukan perjalanan ke Timor bagian barat untuk memenuhi kewajiban keluarga dimulai lagi pada tahun 2001. Ini terfasilitasi dalam sebuah penetapan sederhana antara Administrasi Distrik Oecusse dengan pihak berwenang Indonesia, yang hanya mensyaratkan orang-orang yang melakukan perjalanan tersebut untuk mendapatkan surat ijin yang resmi. Sistem ini tampaknya memenuhi sebuah kebutuhan yang penting (sampai sejumlah 1200 orang mendapatkan surat setiap bulannya), tetapi pada tahun 2003 hal ini berhenti karena

⁷⁵ Hasil-hasil dikutip dalam Andrew McWilliam, 'New Beginnings in East Timorese Forest Management', *Journal of Southeast Asian Studies*, vol 34, no. 2, hal. 307-327, 2003, hal. 310-11. Untuk lebih jauh tentang kayu cendana secara khusus, lihat tulisan pengarang yang sama, 'Haumeni, Not Many: Renewed Plunder and Mismanagement in the Timorese Sandalwood Industry.' *Resource Management in Asia-Pacific Working Paper Series*, ANU, no. 29, 2001

⁷⁶ Meitzner Yoder, *Custom, Codification, Collaboration*, hal. 291-92.

⁷⁷ Wawancara dengan Chirs Walsh, Caritas, 22 Mei 2007.



Hampir semua barang-barang buatan pabrik dan barang-barang prosesan yang dijual di pasar-pasar di Tono berasal dari Indonesia, Mei 2007

berlakunya peraturan-peraturan baru yang mensyaratkan orang-orang yang melakukan perjalanan tersebut untuk membawa paspor dan visa.⁷⁸

Sekarang ini, orang-orang Oecusse yang ingin melintasi tanah perbatasan dengan Indonesia memerlukan paspor (sekurang-kurangnya US\$ 25 – dua puluh lima dolar Amerika), yang memerlukan waktu satu minggu untuk diterbitkan⁷⁹, maupun visa (US\$ 35 – tiga puluh lima dolar Amerika)—yang mana keduanya hanya tersedia di Dili. Ini berarti bahwa untuk mendapatkan lintasan yang sah ke desa-desa terdekat, sering terlihat dalam pandangan mata dari Oecusse, memerlukan sebuah perjalanan yang mahal dan memakan waktu ke Dili terlebih dahulu. Indonesia tidak memberikan visa *multi-entry* (masuk berkali-kali), dan kendatipun visa dua kali jalan tersedia, persyaratan bahwa kedua perjalanan tersebut harus dilakukan dalam kurun waktu satu minggu agaknya meniadakan kelebihan apapun dibanding dengan visa *single-entry* (sekali masuk).

Sementara itu, orang-orang Indonesia yang ingin masuk ke Oecusse dilayani agak lebih baik dengan layanan *visa-on-arrival* (visa pada saat kedatangan) di pos-pos perbatasan di Bobometo (di sub-distrik Oesilo) dan Sakato (titik bagian timur di mana perbatasan bertemu dengan laut), namun, biaya US\$30 (tiga puluh dolar Amerika) tetap bersifat menghalangi bagi sebagian besar orang.

Isu-isu Keamanan Paska Kemerdekaan

Dalam kekerasan paska-referendum bulan September dan Oktober 1999, lebih dari 164 orang terbunuh oleh milisia pro-integrasi di Oecusse—sebagian besar dalam dua pembantaian di desa Tumin dan Maquelab—dan 70 persen dari rumah tinggal diluluhlantakkan.⁸⁰ Oecusse dijangkau oleh pasukan INTERFET lebih belakangan dibandingkan

⁷⁸ ICG, *Managing Tensions*, hal.9.

⁷⁹ Untuk dua-hari selesai bisa didapat dengan harga US\$60 (enam puluh dolar Amerika).

⁸⁰ Meitzner Yoder, *Custom, Codification, Collaboration*, hal 21.

dengan semua wilayah lainnya disebabkan karena keterisolirannya, memungkinkan milisia mengamuk tanpa dihalangi untuk waktu yang lebih lama dibandingkan daerah-daerah lainnya. Masyarakat Oecusse sangat sadar tentang hal ini, sebagaimana telah didokumentasikan oleh para pengamat independen⁸¹, milisia pro-integrasi bertindak dengan dorongan semangat dan dukungan materiil dari militer Indonesia: TNI.

Saat ini, perbatasan internasional antara Timor-Leste dengan Indonesia, keduanya untuk Oecusse, dan perbatasan utama di sisi bagian barat distrik Bobonaro dan Covalima, dipatroli oleh TNI di bagian Indonesia dan BPU (Border Patrol Unit – Unit Patroli Perbatasan) dari pasukan kepolisian Timor-Leste di bagian Timor-Leste. BPU tidak dirancang ataupun dilengkapi untuk menjaga dari serbuan wilayah dalam skala besar. Perannya dibatasi untuk menjaga ketertiban penyebrangan perbatasan, menghalangi dan mengejar para penyelundup dan pencuri ternak, dan, jika mungkin, menahan bentrokan lintas perbatasan antar desa pada saat bentrokan tersebut muncul agar tidak menyebar, sebagaimana pernah terjadi di Passabe dan Oesilo pada tahun 2005.⁸²

Sengketa-sengketa Passabe dan Oesilo terkait dengan tanah dan perbedaan ide tentang lokasi perbatasan yang persis terus berlanjut, dan secara signifikan, belum ada kesan dari masyarakat bahwa konflik tersebut ada hubungannya dengan bekas milisia. Beberapa bekas anggota milisia memang terus tinggal di desa-desa dekat dengan perbatasan—termasuk ketua milisia *Sakunar* (kalajengking), yang dilaporkan tinggal di Wini⁸³—namun, tidak ada indikasi bahwa milisi tetap aktif. Kehadiran TNI dalam jumlah banyak di Timor bagian barat⁸⁴ juga menambah rasa ketidakamanan, dengan insiden-insiden seperti sebuah serangan oleh tentara TNI pada bulan Desember 2006 tidak membantu menenangkan kecurigaan masyarakat bahwa militer Indonesia memelihara sebuah kepentingan di Oecusse.⁸⁵

Dari sudut pandang TNI, kehadiran terus menerus bekas milisia, selain juga ketidakstabilan di Timor-Leste, telah memberikan sebuah cara retorik untuk menjustifikasi kehadirannya yang besar sambil juga memungkinkannya mempengaruhi kebijakan perbatasan dengan cara-cara yang juga memenuhi kepentingannya sendiri. Pada tahun 2002, para petugas senior TNI menyebutkan persoalan keamanan sebagai alasan bahwa mereka tidak akan membiarkan pengimplementasian sebuah rencana untuk membentuk sebuah 'koridor transit' yang membolehkan bis-bis umum melakukan perjalanan dari perbatasan bagian timur Oecusse di Sakato-Wini, melalui wilayah Indonesia menuju Batugade di Bobonaro.⁸⁶

Rencana ini mempunyai dukungan yang kuat di Oecusse. Manfaat-manfaat yang sering dikutip termasuk mengurangi ketergantungan Oecusse pada layanan feri; memperkuat integrasi Oecusse dengan Bobonaro dan Dili dengan membolehkan perjalanan darat yang bebas paspor dan visa; dan secara potensial menghilangkan kebutuhan terhadap barang-barang yang diangkut dari Oecusse ke Dili lewat darat untuk dibongkar untuk

⁸¹ Geoffrey Robinson, 'People's War: Militias in East Timor and Indonesia', *South East Asia Research*, vol. 9, no.3, hal. 275.

⁸² Interviews with people in Passabe, December 2005. See also ICG's Policy Briefing, 'Managing Tensions on the Timor Leste-Indonesia Border'

⁸³ ICG Policy Briefing, *Managing Tensions on the Timor Leste/Indonesia Border*, hal. 4. ICG melaporkan bahwa sebuah seruan dari bekas wakil ketua Moko Soares kepada para bekas anggota Sakunar untuk mendaftarkan diri mereka membuahkan hasil (26) dua puluh enam nama dari desa-desa di sekitar Oeolo.

⁸⁴ Lihat Damian Kingsbury, 'East Timor Border Security', dalam Damian Kingsbury, ed., *Violence in Between, Conflict and Security in Archipelagic Southeast Asia*, Monash University Press, Melbourne, 2005, hal. 294-97. Pada tahun 2003, satu 'detasemen' (detasemen bisa berjumlah sampai 500 prajurit) Kostrad Batalion 407 ditempatkan di sepanjang perbatasan Oecusse. Pasukan-pasukan ini adalah disamping pasukan teritorial yang ditugaskan di kabupaten-kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kupang yang membatasi Oecusse. Juga, pada bulan Mei 2007, Indonesia mengerahkan 2000 pasukan tambahan di sepanjang perbatasan utama, menambahkan 1500 pasukan yang sudah ada disana, menyebutkan persoalan keamanan yang berkaitan dengan ketidakstabilan politis di seputar pemilu di Timor-Leste. Lihat, AFP, 'Indonesia, East Timor to discuss border security', 16 Mei 2007.

⁸⁵ Wawancara dengan berbagai sumber di Oecusse pada bulan Mei 2007.

⁸⁶ 'TNI rejects proposal on land travel to/from E. Timor's Oecusse', *The Jakarta Post*, 16 April 2002.

pemeriksaan bea cukai, militer dan kepolisian, dan dimuat kembali ke dalam kendaraan yang berbeda dua kali di masing-masing arah. Jalannya sendiri dari Atambua dan Wini, di sisi Indonesia dari perbatasan Oecusse bagian timur, dilaporkan ada dalam kondisi yang bagus, dan perjalanan antara titik-titik perbatasan di Batugade dan Wini memerlukan waktu satu jam lebih sedikit.⁸⁷

Sebuah kesepakatan tahun 2002 antara UNTAET dengan Pemerintah Indonesia menguraikan syarat-syarat untuk rencana tersebut.⁸⁸ Namun demikian, Kol. Moeswarno Moesanip, komandan militer Indonesia untuk NTT, berkata bahwa keamanan orang-orang Timor Timur yang lewat melalui Kefamanu dan Atambua 'tidak dapat dijamin [...] bahkan jika Jakarta menyetujui rencana tersebut', disebabkan karena populasi militan pengungsi Timor Timur yang ada di daerah tersebut.⁸⁹ Tidak jelas apakah masalah keamanan yang sebenarnya pernah, atau tetap, menjadi alasan untuk tidak terwujudnya usulan tersebut. Tetapi mengingat bahwa pada bulan April 2005, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhono secara publik menegaskan ulang komitmen pemerintahannya untuk melihat rencana tersebut diteruskan⁹⁰, ini menyiratkan bahwa di sana masih ada perlawanan yang kuat dari tubuh TNI yang mungkin merasa rencana tersebut sebagai bertentangan dengan kepentingan mereka.

Untuk pihak Timor-Leste, jika toh laporan dari kunjungan ke Oecusse oleh Komite Parlemen (komite Ekonomi dan Keuangan) pada tahun 2006 adalah pedoman, maka tampaknya prioritas keamanannya adalah menegaskan hak negara untuk mengumpulkan pajak impor. Walau mengungkapkan optimisme untuk pertumbuhan ekonomi potensial Oecusse justru karena perbatasannya dengan Indonesia, laporan ini menekankan bahwa 'untuk mempromosikan perdagangan lintas-batas, peraturan-peraturan perlu dibentuk termasuk penerapan tegas atas pajak barang-barang yang masuk dari Indonesia ke Oecusse'.⁹¹

Secara keseluruhan, rejim perbatasan yang ada saat ini antara dua negara mencerminkan sebuah penafsiran yang sangat terpusat pada negara (*state-centric*) mengenai keamanan. Ini pada hakekatnya adalah sebuah kebijakan 'perbatasan yang tegas' yang mana ekspresi kedaulatan negara diprioritaskan melalui usaha pengawasan atas pergerakan lintas batas dari orang-orang, kendaraan dan barang. Barang-barang yang bergerak melintasi batas dikenakan pajak dan cukai, dan upaya yang sungguh-sungguh dikeluarkan untuk mengumpulkannya.

Secara kontras, satu pesan yang jelas yang datang dari semua sektor masyarakat Oecusse adalah bahwa mengamankan masa depannya terletak pada sebuah pendekatan 'perbatasan lunak' yang akan memungkinkan penguatan hubungan-hubungan dengan komunitas di Timor bagian barat melalui koneksi-koneksi keluarga, komunal dan perdagangan. Pendekatan sedemikian tersebut akan memerlukan peran militer yang berkurang (untuk digantikan oleh polisi), membuang paspor dan visa dan menggantikannya dengan sebuah sistem pas yang realistis bagi para penduduk setempat yang hidup di sepanjang perbatasan ini, dan penghapusan berbagai tarif perdagangan dan pajak impor untuk komoditi-komoditi pokok.⁹²

⁸⁷ Wawancara dengan Brian Frantz, USAID, Dili, 16 Mei 2007. (Lima titik perhentian adalah untuk pemeriksaan militer, bea cukai, imigrasi, polisi dan pendaftaran kendaraan).

⁸⁸ ICG Policy Briefing, *Managing Tensions on the Timor-Leste/Indonesia Border*, hal. 9.

⁸⁹ 'TNI rejects proposal'.

⁹⁰ United Nations Security Council, 'End of Mandate Report of the Secretary General on the United Nations Mission of Support in East Timor for period 17 February – 11 May, 2005', Dili, 12 Mei 2005.

⁹¹ RDTL National Parliament, Committee C (Economy and Finance), 'Report of a District Visit to Oecusse', alinea. 25.

⁹² Wawancara yang banyak di Oecusse pada bulan Desember 2005 dan Mei 2007. Lihat juga umpan balik masyarakat dalam Strategi Pembangunan Terpadu Oecusse dari UNDP (UNDP's 'Oecusse Integrated Development Strategy'), 2001

Adalah sebuah hal yang mengandung pelajaran bahwa terlepas dari usaha-usaha untuk menerapkan kebijakan perbatasan yang tegas, para petugas BPU, pedagang, pemilik usaha kecil, pekerja LSM dan masyarakat umum Oecusse menuntut bahwa perdagangan lintas batas informal bagaimanapun juga dilanjutkan.⁹³ Namun demikian, pengaruh dari kebijakan ini adalah bahwa ia memaksa orang-orang untuk mengambil resiko yang lebih besar, dengan memanfaatkan jalan tikus—sering pada malam hari. Dan, tentu saja, dengan keluar dari hukum mereka memiliki resiko ditangkap dan didenda. Nasib seorang warganegara Timor-Leste yang ditembak mati oleh serdadu TNI yang mencurigainya melakukan tindakan penyelundupan, di dalam wilayah Indonesia dekat Fatumean (distrik Covalima) pada bulan Oktober 2007, menyoroti bahaya yang ada dari kegiatan sejenis ini.⁹⁴

Sebuah pendekatan alternatif untuk membangun keamanan di sekitar perbatasan adalah serangkaian dialog lintas batas yang ditujukan untuk membangun kembali kepercayaan diantara komunitas yang terkena kekerasan pada tahun 1999. Difasilitasi oleh LSM setempat, seperti FFSO (di Oecusse) dan Lakmas (di Timor bagian barat), pembicaraan-pembicaraan sudah dilangsungkan di sepuluh titik di sepanjang perbatasan Oecusse dan dilaporkan sudah diterima dengan sangat baik.⁹⁵

Layanan-layanan Infrastruktur dan Konsuler

Mempersulit keterisoliran ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh penutupan jalur darat ke Dili adalah mengerikannya kondisi jalan dan jembatan di dalam distrik ini sendiri. Jalan utama yang menghubungkan Passabe dengan kota Oecusse selama periode Indonesia menghindari dataran yang sulit dengan cara mengalihkannya melalui Timor bagian barat. Setelah tahun 1999, jalur ini sudah tidak tersedia lagi.⁹⁶ Selama musim hujan beberapa sungai bisa menjadi tidak dapat dilalui, memutuskan komunitas-komunitas yang tinggal di subdistrik-subdistrik Passabe, Nitibe dan Oesilo dari kota Oecusse di pantai, layanan feri Dili dan karenanya dari seluruh sisa negara ini.⁹⁷

Pembicaraan-pembicaraan tentang melokasikan suatu bentuk layanan konsulat Indonesia di Oecusse sudah dilakukan antara Administrasi Distrik Oecusse dengan Gubernur NTT.⁹⁸ Hal ini sedianya akan menghapuskan kebutuhan bagi orang-orang untuk melakukan perjalanan ke Dili untuk mendapatkan visa untuk perjalanan ke Kefamenanu, Atambua, Kupang dan lebih jauh lagi, kendati demikian, tidak seperti sistem pas, ini tidak akan mengatasi isu biaya-biaya visa yang sifatnya menghalangi. Pengimplementasiannya juga akan tergantung pada para menteri luar negeri dan imigrasi dari kedua negara.

Sebuah usulan untuk mengatasi masalah tentang akses ke perdagangan lintas batas yang sah adalah untuk membentuk pasar-pasar tepat di perbatasan di lokasi-lokasi yang ditunjuk. Sebuah daerah di dekat pos perbatasan Bobometo (Oesilo) sudah dipersiapkan untuk pasar-pasar di mana fasilitas penyimpanan sudah dibangun oleh pihak berwenang Indonesia. Ada sebuah preseden untuk pasar-pasar jenis ini, yang pernah beroperasi dalam waktu singkat di perbatasan Bobonaro dan Covalima, berdasarkan pada sebuah kesepakatan antara pengamat militer PBB, PKF, TNI dan kepolisian Indonesia.⁹⁹

Dampak Ekonomi dari Kebijakan-kebijakan Perbatasan

Dampak dari situasi perbatasan pada harga pasar di Oecusse berlipat-lipat. Namun, kesan keseluruhan adalah ongkos untuk beberapa barang pokok di Oecusse cenderung agak lebih

⁹³ Wawancara yang banyak di Oecusse pada bulan Desember 2005 dan Mei 2007.

⁹⁴ AFP, 'Indonesian army chief defends shooting of suspected Timor smuggler', Jakarta, 28 Oktober, 2007.

⁹⁵ Wawancara dengan Arno Suni, FFSO, Oecusse, 25 Mei 2007.

⁹⁶ Meitzner Yoder, *Custom, Codification and Collaboration*, hal. 25.

⁹⁷ Ministry of Internal Administration, *District Profile – Oecusse Enclave* (Kementerian Administrasi Dalam Negeri, Profil Distrik – Enclave Oecusse).

⁹⁸ Wawancara dengan Richard Mounsey, Kantor Administrasi Distrik Oecusse, 25 Mei 2007.

⁹⁹ Damian Kingsbury, 'The Political Economy of Cross Border Relations: The TNI and East Timor', *South East Asia Research*, vol. 11, no. 3, 2004, hal. 269-296, hal. 280-81.

tinggi dibandingkan dengan di Dili. Ini terutama sekali benar untuk barang-barang apapun yang berasal dari Indonesia yang masuk ke Oecusse melalui Dili, yang tertangani dua kali. Contoh-contoh yang paling umum disebut tentang disparitas harga antara Oecusse dan Dili adalah semen (satu sak semen \$2 – dua dolar lebih tinggi), beras (sampai \$6 – enam dolar lebih tinggi), dan gula.¹⁰⁰

Di mana ada biaya yang sebanding, atau dalam hal item-item tertentu – minuman ringan, alkohol dan rokok – bahkan lebih murah, hal ini terjadi karena barang-barang tersebut diselundupkan masuk melalui perbatasan Oecusse langsung dari Timor bagian barat. Kingsburry memberikan alasan bahwa TNI sanggup memasok item-item tersebut lebih murah karena mereka mengelakkan pajak-pajak Indonesia pada saat membelinya.¹⁰¹ Para pedagang di pasar-pasar Tono di Oecusse menegaskan bahwa item-item khusus tersebut selalu lebih murah jika diambil dari Timor bagian barat dibandingkan dari Dili, hal yang logis mengingat item-item tersebut juga menarik cukai barang-barang mewah dalam pengiriman sah masuk ke Timor-Leste.

Barang-barang yang masuk langsung ke Oecusse terkena konsesi pajak impor sebesar 2 persen, tetapi, ini secara efektif tidak relevan jika barang-barang masuk ke Oecusse melalui Dili, karena pajak yang lebih tinggi sudah dibayarkan – dan tidak diragukan diberikan – bersamaan dengan biaya pengiriman tambahan.

Para pedagang Oecusse juga melaporkan bahwa para pemasok yang lebih terorganisir dari sisi Indonesia biasanya meminta pembayaran dalam bentuk rupiah, dan mengambil untung dengan menjual rupiah dengan kurs Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk \$ 1.10 (satu dolar sepuluh sen) – menciptakan margin 10 (sepuluh) persen pada saat ditukar kembali ke rupiah dengan kurs Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk \$1 (satu dolar) yang ditawarkan di Atambua. Para pedagang melaporkan bahwa barang-barang bisa lewat melalui beberapa orang dalam rantai suplai, yang mana setiap orang membuat keuntungan sedikit. Para pedagang pasar melaporkan bahwa ketidakstabilan banyak sekali ada dalam harga-harga, dan mereka secara teratur berganti sumber suplai untuk mendapatkan harga paling rendah.

Kesimpulan

Laporan ini telah menggambarkan banyak dari tantangan-tantangan yang dihadapi pembangunan di daerah kantong Oecusse. Terutama sekali, akses ke wilayah ini sangat sulit karena ia terpotong dari Timor-Leste sisanya. Dikarenakan statusnya yang khas, maka ada dialog terus menerus tentang solusi-solusi yang mungkin terhadap keterisoliran ekonomi dan geografis. Solusi-solusi ini digolongkan di sini ke dalam dua kategori. Kategori pertama diarahkan ke prakarsa-prakarsa yang dipikirkan akan sekiranya mendorong produktifitas dan profitabilitas basis ekonomi Oecusse sekarang ini, termasuk pertanian (termasuk peternakan) dan kehutanan. Pilihan kedua yang dibahas dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi di Oecusse adalah yang menerapkan insentif untuk menarik penanaman modal dari luar distrik. Ini termasuk manufakturing rendah atau tidak trampil, pemrosesan untuk ekspor, pemrosesan makanan dan minuman, dan pembangunan pariwisata.

Berpotongan dengan dua kategori ini adalah kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perbatasan yang mempengaruhi baik pembangunan ekonomi maupun keamanan di daerah kantong ini. Pembangunan ekonomi yang sangat dibutuhkan Oecusse mensyaratkan sebuah set yang jelas dari program-program terpadu, yang diambil dari konsultasi yang benar dengan masyarakat Oecusse, yang, setidaknya-tidaknya, memusatkan perhatian pada

¹⁰⁰ Oxfam, *Sustainable Livelihoods in Oecusse, Timor-Leste: A Participatory Research Project* (Mata Pencaharian Berkelanjutan di Oecusse, Timor-Leste: Sebuah Proyek Riset Partisipatoris).

¹⁰¹ Kingsburry, 'The Political Economy of Cross Border Relations', hal. 280 81.

pertanyaan-pertanyaan mengenai perdagangan dan pergerakan dari orang-orang lintas perbatasan.

Mudah-mudahan laporan ini memberikan ikhtisar yang bermanfaat tentang status Oecusse sebagai daerah kantong dan wacana-wacana yang ada sekarang tentang pembangunannya yang akan datang, yang pada gilirannya akan menginformasikan para penasehat kebijakan, aktor-aktor pembangunan dan warganegara Timor-Leste dalam kerja mereka.

Bibliografi

- AFP, 'Indonesia, East Timor to discuss border security', 16 May, 2007.
- AFP, 'Indonesian army chief defends shooting of suspected Timor smuggler', 28 October, 2007.
- Anuno, J, (Indonesian language) 'Untitled', unpublished book manuscript on Oecusse, 2002, p. 6. Available at: www.Timor-Leste.org.
- Anuno, J and J Muni Salu, *Draf Undang-Undang Status Khusus Enclave Oecusse/Ambeno, Maret, 2003: Rencana Pembentukan Daerah Administratif Khusus Oe-cusse*, (Draft Law on the Special Status of the Oecusse/Ambeno Enclave, March 2003: Plans for the Creation of a Special Administrative Area of Oecusse, 2003), Oecusse, 2003.
- Bano, Arsenio and Edward Rees, 'The Oecusse–Ambeno Enclave: What Does the Future Hold for this Neglected Territory?', *Inside Indonesia*, July-September 2002.
- Cribb, Robert, *Historical Atlas of Indonesia*, University of Hawai'i Press, Honolulu, 2000.
- Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste*, Dili, 2002.
- Draft Organic Act Declaring Oecusse as a Special Economic Zone*, Office of the Secretary of State for Oecusse, 2007.
- East Timor Transitional Administration, ADB, World Bank and UNDP, *The 2001 Survey of Sucos: Initial Analysis and Implications for Poverty Reduction*, 2001.
- Food Security Consultancy Recommendations Report*, based on a field trip to several sites under Oxfam Oecusse's Livelihoods Program, 26 September 2005.
- Fox, James J, 'Drawing from the Past to Prepare for the Future: Responding to the Challenges of Food Security in East Timor', in *Agriculture: New Directions for a New Nation, East Timor (Timor-Leste)*, Dili, 2002.
- Fox, James J, 'Diversity and Differential Development in East Timor: Potential Problems and Future Possibilities', in Hal Hill and Joao Saldanha, eds, *East Timor: Development Challenges for the World's Newest Nation*, Singapore, ISEAS, 2001.
- Fox, James J, 'The Paradox of Powerlessness: Timor in Historical Perspective', paper presented at the Nobel Peace Prize Symposium: Focus on East Timor, University of Oslo, 1996.
- Fox, James J, 'Origin, Descent and Precedence in the Study of Austronesian Society', public lecture, 17 March, 1988.
- Fox, James J, 'The Historical Consequences of Changing Patterns of Livelihood on Timor', in Deborah Wade-Marshall and Peter Loveday, eds, *Northern Australia, Progress and Prospects: Contemporary Issues in Development*, Darwin, ANU, 1988.
- Hadiz, Vedi R., 'Decentralisation and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives', Southeast Asia Research Centre, City University of Hong Kong, *Working Paper Series*, no. 47, May 2003.
- Hicks, David, *Tetum Ghosts & Kin: Fertility and Gender in East Timor*, Illinois, Waveland Press, 1976, 2004.
- ICG Policy Briefing, *Managing Tensions on the Timor-Leste/Indonesia Border*, no. 50, Jakarta/Brussels, 4 May 2006.
- Kingsbury, Damian, 'East Timor Border Security', in Damian Kingsbury, ed., *Violence in Between, Conflict and Security in Archipelagic Southeast Asia*, Monash University Press, Melbourne, 2005.

- Kingsbury, Damian, 'The Political Economy of Cross-Border Relations: The TNI and East Timor', *South East Asia Research*, vol. 11, no. 3, 2004.
- McWilliam, Andrew, 'New beginnings in East Timorese Forest Management', *Journal of Southeast Asian Studies*, vol. 34, no. 2, June 2003, pp. 307-327.
- McWilliam, Andrew, 'Haumeni, Not Many: Renewed Plunder and Mismanagement in the Timorese Sandalwood Industry', *Resource Management in Asia-Pacific Working Paper Series*, ANU, no. 29, 2001.
- McWilliam, Andrew, *Paths of Origin, Gates of Life: A study of place and precedence in southwest Timor*, KITLV Press, Leiden, 2000.
- McWilliam, Andrew, 'Development Technologies and the Classification of Strangers in West Timor', in Lorraine V. Aragon and Susan D. Russell, eds, *Structuralism's Transformations: Order and Revision in Indonesia and Malaysian Societies*, Arizona State University, Tempe, 1999.
- McWilliam, Andrew, 'Strategies for Subsistence in West Timor', in Deborah Wade-Marshall and Peter Loveday, eds, *Northern Australia, Progress and Prospects: Contemporary Issues in Development*, ANU, Darwin, 1988.
- Meitzner Yoder, Laura, *Custom, Codification and Collaboration: Integrating the Legacies of Land and Forest Authorities in Oecusse Enclave, East Timor*, unpublished PhD thesis, Yale University, 2005.
- Metzner, Joachim K, *Man and His Environment in Eastern Timor*, unpublished PhD thesis, Canberra, ANU, 1977.
- Ministry of Internal Administration RDTL, *Oecusse District Profile*, Dili, May 2004.
- National Statistics Directorate, *Timor-Leste Census of Population and Housing 2004 Atlas*, Dili, 2006.
- Nixon, Rod, 'Indonesian West Timor, the Political Economy of Emerging Ethno-Nationalism', *Journal of Contemporary Asia*, vol. 34, no. 2, 2004, pp. 163-185.
- Ormeling, FJ, *The Timor Problem: A Geological Interpretation of an Underdeveloped Island*, AMS Press, New York, 1956.
- Oxfam and GTZ, *The Customary Use and Management of Natural Resources in Timor-Leste*, Discussion Paper for the Directorate of Land and Property Government of Timor-Leste, Dili, December 2003.
- Oxfam, *Sustainable Livelihoods in Oecusse, Timor-Leste: A Participatory Research Project*, June-September 2003.
- Oxfam, *Underlying Causes of Gender Inequity in Covalima, Timor-Leste*, September 2003.
- RDTL National Parliament, *Report of a Visit to Oecusse by Committee C (Economy and Finance)*, Dili, 9 October 2006.
- Reid, Anthony, *An Indonesian Frontier: Aceh and North Sumatra*, Singapore University Press, Singapore, 2005.
- Robinson, Geoffrey, 'Militias in East Timor and Indonesia', *South East Asia Research*, vol. 9, no. 3.
- Salumata, Regio da Cruz, 'Spesial status dan otonomi khusus kepada Oecusse enclave untuk mengaturnya merupakan sesuatu entitas logis', ('Special status and special autonomy for Oecusse enclave to administer it is a logical entity'), *Suara Timor Lorosae*, (eight-part series from 21 May 2007).
- Schulte Nordholt, HG, *The Political System of the Atoni of Timor*, Martins Nijhof, The Hague, 1971.

- Scott, James, *Seeing Like a State*, Yale University Press, London, 1998.
- SMERU Research Institute, *Development Challenges in East Nusa Tenggara*, October-December 2006.
- Soesastro, Hadi, 'East Timor's Economic Relations with Indonesia', in Hal Hill and Joao Saldanha, eds, *East Timor: Development Challenges for the World's Newest Nation*, ISEAS, Singapore, 2001.
- The Jakarta Post*, 'TNI rejects proposal on land travel to/from E.Timor's Oecusse', 16 April, 2002.
- Timor Timur dalam Angka 1996* (East Timor in Figures). BAPPEDA Tk. I Propinsi Timor Timur dengan Kantor Statistik Propinsi Timor Timur (Regional Development Planning Board and Statistical Office of East Timor Province), 1997.
- The Asia Foundation, *National Survey of Voter Knowledge*, Dili, May 2001.
- Therik, Tom, *The Female Land: Traditions of a Timorese Ritual Centre*, ANU/Pandanus Books, Canberra, 2004.
- UNDP, *Oecusse Integrated Development Strategy*, 2001.
- United Nations Security Council, 'End of Mandate Report of the Secretary General on the United Nations Mission of Support in East Timor for period 17 February–11 May, 2005', Dili, 12 May 2005.
- UNICEF, *Multiple Indicator Cluster Survey*, Republic of Timor-Leste, Dili, 2002.
- USAID News Release, 'US Diplomat Visits Oecusse, Urges Action to Help the Enclave', Dili, 6 February 2007.
- USAID, 'Policy Issues for USAID: Oecusse', Dili, 25 January, 2007.